



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, DALDUK DAN KB

LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERSUB KEGIATAN	x
NERACA	xxix
LAPORAN OPERASIONAL	xxxiv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxxix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Periode Pelaporan Keuangan	3
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3
1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II PROFIL SKPD	8
2.1 Sumber Daya SKPD	8
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	22
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025	61
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025	29
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.	38
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	39
4.1 Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	39
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan	39
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	39
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	40
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan	41
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja	42
4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan	43
4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	45
4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban	46

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	49
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	49
5.2	Neraca	64
5.3	Laporan Operasional	71
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	78
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	79
6.1	Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	79
6.2	Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	79
6.3	Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran	80
BAB VII	PENUTUP	81
LAMPIRAN		



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disajikan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah pemerintah daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan Menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB Provinsi Kepulauan Riau,

BURHANUDDIN, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19710320 199803 1 00



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman : <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB Provinsi Kepulauan Riau,


BURHANUDDIN, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19710320 199803 1 008





PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
3	BELANJA DAERAH	27.885.967.298,00	25.691.508.378,00	93,47	22.148.867.693,91
5.1	BELANJA OPERASI	23.244.898.416,00	22.833.642.889,00	98,79	22.138.317.699,91
5.1.01	Belanja Pegawai	9.655.029.805,00	8.994.809.840,00	93,17	8.256.482.477,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.126.088.300,00	3.956.864.458,00	96,04	3.023.354.294,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.004.955.434,00	2.918.100.990,00	97,14	2.078.143.200,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.137.075.534,00	2.091.865.300,00	97,85	2.078.143.200,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	867.281.000,00	828.034.700,00	95,47	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	239.088.832,00	231.186.002,00	96,69	189.325.972,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165.292.343,00	164.890.518,00	99,66	189.325.972,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	73.812.480,00	66.275.444,00	90,03	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jaminan ASN	141.230.000,00	138.590.800,00	98,09	157.410.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jaminan PNS	141.230.000,00	138.590.800,00	98,09	157.410.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	147.801.000,00	146.923.000,00	99,41	238.726.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	147.801.000,00	146.923.000,00	99,41	238.726.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	98.795.000,00	97.190.000,00	97,39	37.885.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.975.000,00	81.599.000,00	99,12	37.885.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55.820.000,00	55.600.000,00	99,60	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Meras ASN	161.871.120,00	157.441.000,00	97,23	101.532.840,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Meras PNS	161.871.120,00	161.126.000,00	99,55	101.532.840,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Meras PPPK	59.442.940,00	54.315.000,00	91,34	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.382.088,00	7.301.503,00	98,91	16.528.471,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.382.088,00	7.301.503,00	98,91	16.528.471,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembelian Gaji ASN	54.813,00	82.122,00	95,80	51.798,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembelian Gaji PNS	33.629,00	32.868,00	97,14	31.798,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembelian Gaji PPPK	21.184,00	19.254,00	90,79	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan ASN	211.153.818,00	213.876.054,00	92,18	199.253.524,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan PNS	211.159.256,40	185.931.803,00	91,80	199.253.524,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan PPPK	39.853.661,60	37.944.451,00	94,97	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan Kerja ASN	6.444.589,00	6.321.181,00	98,09	4.268.110,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan Kerja PNS	4.368.817,00	4.333.801,00	99,38	4.268.110,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan Kerja PPPK	2.081.772,00	1.987.378,00	95,37	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan ASN	18.333.512,00	18.963.214,00	98,09	12.867.429,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan PNS	13.082.473,00	13.061.440,00	99,38	12.867.429,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Jaminan Jaminan Kesehatan PPPK	6.251.044,00	5.901.774,00	94,37	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Jaminan Sempurna Peserta Tabungas Perumahan Rakyat ASN	39.327.099,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Jaminan Sempurna Peserta Tabungas Perumahan Rakyat PNS	39.327.099,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.534.931.493,00	5.418.045.586,00	98,23	5.778.296.183,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Jabatan Kerja ASN	2.590.022.231,00	2.608.167.523,00	98,77	2.635.285.652,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Jabatan Kerja PNS	2.590.022.231,00	2.608.167.523,00	98,77	2.635.285.652,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kreditur Kerja ASN	818.816.466,00	500.075.730,00	96,76	394.386.201,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	516.818.466,00	500.078.770,00	96,76	594.386.203,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.468.082.799,00	2.428.603.131,00	98,44	2.548.724.326,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.468.082.799,00	2.428.603.131,00	98,44	2.548.724.326,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Penempatan Objek/ Lokasi ASN	0,00	0,00	0,00	432.212.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Hiburan	0,00	0,00	0,00	432.212.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Hiburan Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	444.052.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Hiburan Pengaduan Barang Isak	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.589.056.331,00	13.638.733.249,00	93,01	12.678.875.216,91
5.1.02.01	Belanja Barang	1.157.888.336,00	2.919.100.398,00	93,44	3.580.754.111,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.149.891.236,00	2.919.100.398,00	93,67	3.296.925.111,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	174.231.400,00	173.280.000,00	99,43	600.000.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Bakar	0,00	0,00	0,00	37.174.100,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lar Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	94.884.200,00	94.195.044,00	99,27	73.229.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.827.293,00	42.204.746,00	96,75	39.152.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.088.300,00	44.184.232,00	90,21	16.807.786,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	281.854.120,00	332.973.707,00	78,83	13.539.947,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.346.000,00	8.490.000,00	99,34	9.270.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tesis	11.425.577,00	9.930.572,00	87,00	9.267.548,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	54.601.000,00	55.411.373,00	99,56	23.409.300,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Prasat Kantor	14.440.872,00	10.579.024,00	73,26	20.608.600,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.703.000,00	12.558.795,00	91,69	11.031.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendidikan Olahraga	4.389.000,00	4.382.280,00	99,83	0,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Servis/Revisi Mata	248.803.613,00	244.833.570,00	98,57	25.610.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	304.279.500,00	109.571.220,00	36,02	1.024.580.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.375.500,00	2.374.850,00	99,97	17.893.200,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	6.956.500,00	5.436.430,00	78,17	462.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Ujwal/Usahakan-Persediaan untuk Ujwal/Usahakan kepada Masyarakat	555.820.500,00	513.182.925,00	92,33	146.023.300,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Ujwal/Usahakan-Persediaan untuk Ujwal/Usahakan Lainnya	178.130.000,00	178.683.825,00	99,75	115.390,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Negeri dan Pakan-Negeri	256.416.014,00	254.122.917,00	99,11	950.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Negeri dan Pakan-Negeri dan Pakan Lainnya	5.736.500,00	5.573.106,00	97,15	232.968.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapi	461.690.000,00	419.587.400,00	90,87	705.342.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tesis Tesis	36.130.000,00	33.733.000,00	93,36	12.310.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Umum Kesehatan	86.412.800,00	86.828.000,00	99,32	95.951.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	303.900.000,00	167.332.000,00	55,09	227.823.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakan dan Pakan (Pakan)	50.400.000,00	50.343.600,00	99,89	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakan dan Pakan (Pakan)	15.000.000,00	14.985.600,00	99,90	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakan dan Pakan (Pakan)	18.150.000,00	18.131.850,00	99,90	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakan dan Pakan (Pakan)	103.672.800,00	96.732.450,00	93,23	231.612.000,00
5.1.02.01.01.01	Belanja Aset Tetap yang Tidak Menyebabkan Kenaikan Kapitalisasi	7.997.300,00	0,00	0,00	3.799.000,00
5.1.02.01.01.01.01	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Peralatan-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepon	7.997.300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.01.01.01	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	3.799.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.687.933.570,00	4.256.369.551,00	90,79	4.826.935.724,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.978.031.915,00	3.593.466.592,00	90,11	3.558.253.846,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Penilikasi Acara, dan Panitia	292.700.000,00	268.200.000,00	91,97	318.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pembinaan/pengantar	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Keahlian	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Pengawasan Promosi dan Sarana Umum	1.685.000,00	0,00	0,00	5.015.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Keahlian dan Kebudayaan	14.000.000,00	13.952.500,00	99,65	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	846.710.625,00	826.770.412,00	97,64	1.745.803.280,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	56.200.000,00	66.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	256.398.400,00	247.182.800,00	96,41	553.680.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	53.995.555,00	53.991.185,00	99,99	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000.000,00	409.921.800,00	81,98	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Bahan/Bekal, Film, dan Peminjaman	1.063.461.400,00	783.830.000,00	73,27	1.394.251.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan/Tagihan	3.672.000,00	2.885.500,00	78,13	2.089.600,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.887.500,00	4.700.500,00	58,90	2.073.341,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	162.501.740,00	179.168.800,00	98,13	164.068.737,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Asuransi/Kasir/Majalah	14.500.000,00	14.804.000,00	99,53	24.090.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Kawat/Ekstrim/Internet/TV Berlangganan	51.000.000,00	26.481.540,00	51,94	50.761.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pengiriman Paket, Benda, dan Perlengkapan	13.837.800,00	10.156.572,00	88,60	2.819.300,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Medical Check Up	8.552.000,00	7.426.000,00	86,84	16.650.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Gupusanan Pengungkapan/Pengelola Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengajaran Harung Jasa	8.100.000,00	1.700.000,00	18,67	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Jaminan Asuransi	47.254.000,00	41.786.483,00	88,43	90.543.838,00
5.1.02.02.02.0000	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	47.275.140,00	36.316.284,00	87,09	79.774.353,00
5.1.02.02.02.0000	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan Korporasi bagi Non ASN	2.317.370,00	2.208.975,00	95,27	4.786.452,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.761.495,00	2.761.224,00	99,99	5.983.054,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Perantara dan Mesin	251.443.000,00	220.293.100,00	94,53	143.273.000,00
5.1.02.02.04.0050	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	190.800.000,00	181.724.300,00	95,24	88.240.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	12.740.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	643.000,00	0,00	0,00	395.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Pengangkutan)	42.000.000,00	38.479.000,00	91,62	42.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	110.902.000,00	108.257.782,00	97,24	229.263.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	123.400.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	49.950.500,00	99,90	45.890.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Tamu	6.240.000,00	6.064.800,00	97,19	5.700.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.752.000,00	2.243.182,00	47,21	28.980.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.424.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	244.412.656,00	240.155.794,00	98,26	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.922.604,00	99,85	0,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	194.412.656,00	190.233.190,00	97,85	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Karaoke/Pertunjukan, Sialisasi, Hiburan Teatrik serta Pertunjukan dan Pertunjukan	75.300.000,00	61.500.000,00	81,53	5.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Karaoke/Spektakuler/Pertunjukan	75.300.000,00	61.500.000,00	81,53	5.500.000,00
5.1.02.93	Belanja Pemeliharaan	184.340.999,00	174.250.220,00	94,58	543.101.868,91
5.1.02.93.02	Belanja Pemeliharaan Perantara dan Mesin	134.340.999,00	114.582.160,00	92,16	20.667.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pemungut	89.990.999,00	94.167.674,00	93,55	14.531.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.580.000,00	11.481.810,00	99,07	6.100.000,00
5.1.02.03.02.0403	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer (Unit, Personal Computer)	22.750.000,00	18.942.476,00	83,23	7.010.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.000.000,00	59.658.000,00	87,81	514.456.868,91
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	68.000.000,00	59.658.000,00	87,81	514.456.868,91
5.1.03.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.887.420,00	1.281.811.690,00	82,64	2.005.111.511,00
5.1.03.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.550.887.420,00	1.281.811.690,00	82,64	2.005.111.511,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.340.275.420,00	1.274.201.381,00	82,13	1.936.411.511,00
5.1.03.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
5.1.03.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	31.160.000,00
5.1.03.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.660.000,00	7.410.299,00	69,49	7.320.000,00
5.1.03.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Manufaktur	4.008.000.000,00	4.007.400.000,00	99,98	2.004.000.000,00
5.1.03.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Manufaktur	4.008.000.000,00	4.007.400.000,00	99,99	2.004.000.000,00
5.1.03.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Manufaktur	4.008.000.000,00	4.007.400.000,00	99,99	2.004.000.000,00
5.1.04	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.04.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Komersial/Nonprofit yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.04.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Swadaya, Sukarela dan Sosial yang Tidak Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Swadaya, Sukarela dan Sosial yang Tidak Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23.244.898.416,00	22.823.642.889,00	94,79	22.135.377.483,91
5.2	BELANJA MODAL	4.341.886.882,00	3.657.866.790,00	86,23	5.550.000,00
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.082.712,00	322.712.290,00	82,71	5.550.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	239.161.195,00	230.349.640,00	96,18	5.550.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	58.512.207,00	56.114.350,00	95,90	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Peningkatan Peralengkapan Kantor	55.300.000,00	53.390.320,00	96,57	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.012.207,00	2.318.000,00	83,58	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	180.648.988,00	156.455.890,00	86,19	5.550.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	88.686.088,00	83.517.890,00	94,18	2.940.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	28.172.300,00	18.784.450,00	66,81	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.663.000,00	1.458.000,00	87,69	0,00
5.2.02.05.02.0066	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.178.000,00	27.700.600,00	98,30	0,00
5.2.02.05.02.0067	Belanja Modal Alat Peralatan Kebakaran	4.995.000,00	4.978.500,00	99,67	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Ruang Pejabat	2.992.000,00	2.827.800,00	97,85	2.610.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.332.000,00	1.190.000,00	89,34	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6.660.000,00	6.537.800,00	99,67	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	8.880.000,00	8.518.000,00	95,91	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.880.000,00	8.518.000,00	95,91	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.880.000,00	8.518.000,00	95,91	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	110.042.580,00	85.543.250,00	82,01	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer User	90.728.700,00	79.804.500,00	88,01	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	90.728.700,00	79.804.500,00	88,01	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.313.880,00	13.480.750,00	70,33	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.732.400,00	8.186.700,00	59,57	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.561.000,00	5.500.050,00	98,55	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.888.252.107,00	3.330.159.000,00	85,65	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.888.252.107,00	3.330.159.000,00	85,65	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tenaga Kerja	3.888.252.107,00	3.330.159.000,00	85,65	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.888.252.107,00	3.330.159.000,00	85,65	0,00
5.2.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.530.000,00	4.995.000,00	90,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bahan Perpusakaan	5.530.000,00	4.995.000,00	90,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bahan Perpusakaan Tertata	5.530.000,00	4.995.000,00	90,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Buku/ Dikoran	5.530.000,00	4.995.000,00	90,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.341.886.687,00	3.657.866.290,00	84,23	5.550.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.485.967.200,00	25.671.506.379,00	93,47	22.140.867.693,91
	SURPLUS/DEFISIT	(27.485.967.200,00)	(25.671.506.379,00)	93,47	(22.140.867.693,91)

Provinsi Kepulauan Riau, 27 Januari 2026
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

BURHANUDDIN, S.Hut, M.H.
NIP.197103201990031008



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BERSERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KEPALA & DINAS PEMERINTAHAN PERSEKUTUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERKUALITI

BURHANUDDIN, S. JIL., M.A.
 4411 140th Avenue NW
 Edina, MN 55437
 612-933-1111

N E R A C A



Kode Referensi	Uraian	2025	2024
1.102.06.01.0000	Akt. Farmasetika Valid	0.000.000,00	0.000.000,00
1.102.06.01	Praktikum Perawatan	30.000.000,00	30.000.000,00
1.102.06.01.0010	Sebelum/Melakukan Asesmen	30.000.000,00	30.000.000,00
1.102.07	Akt. Pendidikan dan Kejuruan	44.000.000,00	44.000.000,00
1.102.07.01	Akt. Nyaikutan	44.000.000,00	44.000.000,00
1.102.07.01.0001	Akt. Nyaikutan Umum	44.000.000,00	44.000.000,00
1.102.08	Akt. Laboratorium	44.000.000,00	44.000.000,00
1.102.08.01	Only Akt. Laboratorium	27.000.000,00	27.000.000,00
1.102.08.01.0010	Akt. Laboratorium Patologi	3.000.000,00	3.000.000,00
1.102.08.01.0015	Akt. Laboratorium Fisiologi	11.000.000,00	11.000.000,00
1.102.08.01.0018	Akt. Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	9.000.000,00	9.000.000,00
1.102.08.02	Akt. Praktek Praktis Sekolah	10.444.000,00	10.444.000,00
1.102.08.02.0010	Akt. Praktek Praktis Sekolah Bidang Studi Kejuruan	1.000.000,00	1.000.000,00
1.102.08.02.0012	Akt. Praktek Praktis Sekolah Bidang Studi PSN	9.444.000,00	9.444.000,00
1.102.08.04	Akt. Laboratorium Praktek Nyaikutan	0.000.000,00	0.000.000,00
1.102.08.04.0002	Metode Caring and Scientific Education	0.000.000,00	0.000.000,00
1.102.08.04.0005	Special Power Supply	2.000.000,00	2.000.000,00
1.102.09	Akt. Pemasangan	0.000.000,00	0.000.000,00
1.102.09.01	Akt. Nyaikutan Kejuruan	0.000.000,00	0.000.000,00
1.102.09.01.0002	Akt. Nyaikutan Kejuruan	0.000.000,00	0.000.000,00
1.102.09.01.0005	Akt. Nyaikutan Kejuruan	0.000.000,00	0.000.000,00
1.102.10	Komputer	1.622.402.240,00	1.591.127.000,00
1.102.10.01	Komputer Lupa	1.201.000.000,00	1.221.700.000,00
1.102.10.01.0001	Komputer Jaringan	4.000.000,00	4.000.000,00
1.102.10.01.0002	Personal Computer	1.190.000.000,00	1.110.000.000,00
1.102.10.01	Personal Computer	231.002.740,00	231.002.000,00
1.102.10.01.0001	Personal Multimedia	2.000.000,00	2.000.000,00
1.102.10.01.0002	Personal Mini Computer	6.000.000,00	6.000.000,00
1.102.10.01.0003	Personal Personal Computer	235.452.740,00	237.252.000,00
1.102.10.01.0005	Personal Computer Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00
1.102.11	Akt. Kejuruan Kejuruan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.102.11.01	Akt. Kejuruan Kejuruan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.102.11.01.0000	Akt. Kejuruan Kejuruan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.102.11	Personal (Hiburan)	50.000.000,00	50.000.000,00
1.102.11.01	Personal (Hiburan)	50.000.000,00	50.000.000,00
1.102.11.01.0002	Personal Personal	50.000.000,00	50.000.000,00
1.102	Catatan dan Catatan	1.054.540.200,00	1.054.540.200,00
1.102.01	Bangunan Gedung	1.000.540.200,00	1.000.540.200,00
1.102.01.01	Bangunan Gedung Tipe 1000	1.000.540.200,00	1.000.540.200,00
1.102.01.01.0001	Bangunan Gedung Kios	1.000.540.200,00	1.000.540.200,00
1.102.01.01.0002	Bangunan Gedung Tipe 1000	10.000.000,00	10.000.000,00
1.102.01.01	Bangunan Gedung Tipe 1000	100.000.000,00	100.000.000,00
1.102.01.01.0001	Bangunan Gedung Tipe 1000	100.000.000,00	100.000.000,00
1.102.01	Monumen	10.000.000,00	10.000.000,00
1.102.01.01	Catatan/Tagihan/Praktek	10.000.000,00	10.000.000,00
1.102.01.01.0002	Tipe	10.000.000,00	10.000.000,00
1.104	Tipe, Tipe, dan Tipe	420.000.000,00	420.000.000,00
1.104.01	Tipe dan Tipe	347.140.000,00	347.140.000,00
1.104.01.01	Tipe	347.140.000,00	347.140.000,00
1.104.01.01.0000	Tipe Kios	347.140.000,00	347.140.000,00
1.104.01	Bangunan Akt	10.000.000,00	10.000.000,00
1.104.01.01	Bangunan Akt Tipe 1000	17.500.000,00	17.500.000,00
1.104.01.01.0002	Bangunan Praktek/Praktek Tipe	17.500.000,00	17.500.000,00
1.104.01.01	Bangunan Akt Tipe 1000	17.500.000,00	17.500.000,00
1.104.01.01.0000	Bangunan Akt Tipe 1000	17.500.000,00	17.500.000,00
1.104.01	Bangunan Akt Tipe 1000	17.500.000,00	17.500.000,00
1.104.01.01	Bangunan Akt Tipe 1000	17.500.000,00	17.500.000,00

Kode Hacking	Uraian	2025	2024
1.001.00.01	Teknik	81.473.000,00	81.473.000,00
1.001.00.01.0001	Teknik	81.473.000,00	81.473.000,00
1.001.01	Ran Terap Dalam Rencana	782.105.100,00	782.105.100,00
1.001.01.01	Ran Terap Dalam Rencana	782.105.100,00	782.105.100,00
1.001.01.01.0001	Ran Terap Dalam Rencana	782.105.100,00	782.105.100,00
1.001.02	Kemudahan Penyusunan	63.334.722.347,40	63.334.722.347,40
1.001.02	Kemudahan Penyusunan Perbaikan dan Pemeliharaan	63.348.110.940,41	63.348.110.940,41
1.001.02.01	Kemudahan Penyusunan Alat Berat	19.438.790,44	19.438.790,44
1.001.02.01.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Berat Dredge-Trencher	20,44	20,44
1.001.02.01.0003	Kemudahan Penyusunan Alat Berat Penger	171.677.413,00	171.677.413,00
1.001.02.01.0004	Kemudahan Penyusunan Alat Berat-Alat Berat Lainnya	742.588,00	742.588,00
1.001.02.02	Kemudahan Penyusunan Alat Angkut	1.234.248.880,57	1.234.248.880,57
1.001.02.02.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Angkut Darat Termasuk Kendaraan Utama Termasuk Persewaan	798.867.421,37	798.867.421,37
1.001.02.02.0002	Kemudahan Penyusunan Alat Angkut Darat Termasuk Kendaraan Termasuk Persewaan	177.538.800,00	177.538.800,00
1.001.02.02.0003	Kemudahan Penyusunan Alat Angkut Darat Termasuk Kendaraan Termasuk Persewaan	162.336.477,00	162.336.477,00
1.001.02.02.0004	Kemudahan Penyusunan Alat Angkut Darat Termasuk Kendaraan Termasuk Persewaan	206.535.380,00	206.535.380,00
1.001.02.03	Kemudahan Penyusunan Alat Baggel dan Alat Lain	19.888.800,00	19.888.800,00
1.001.02.03.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Baggel Termasuk Perlengkapan Baggel Khusus	14.737.700,00	14.737.700,00
1.001.02.03.0002	Kemudahan Penyusunan Alat Baggel Termasuk Perlengkapan Perlengkapan	145.331.375,00	145.331.375,00
1.001.02.04	Kemudahan Penyusunan Alat Pemrosesan	145.344.100,00	145.344.100,00
1.001.02.04.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Pengolahan-Alat Pengumpul Hasil Perikanan Perikanan	145.344.100,00	145.344.100,00
1.001.03.01	Kemudahan Penyusunan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.772.598.324,00	1.772.598.324,00
1.001.03.01.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Kantor-Mebel Kaki	14.458.800,00	14.458.800,00
1.001.03.01.0004	Kemudahan Penyusunan Alat Kantor-Alat Pengumpul Persewaan Kantor	180.323.790,00	180.323.790,00
1.001.03.01.0005	Kemudahan Penyusunan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	147.546.880,00	147.546.880,00
1.001.03.01.0006	Kemudahan Penyusunan Alat Rumah Tangga-Mebel	713.310.280,00	713.310.280,00
1.001.03.01.0007	Kemudahan Penyusunan Alat Rumah Tangga-Alat Persewaan	16.481.800,00	16.481.800,00
1.001.03.01.0008	Kemudahan Penyusunan Alat Rumah Tangga-Alat Persewaan	183.887.413,00	183.887.413,00
1.001.03.01.0009	Kemudahan Penyusunan Alat Rumah Tangga-Alat Persewaan	183.887.413,00	183.887.413,00
1.001.03.01.0010	Kemudahan Penyusunan Alat Rumah Tangga-Alat Persewaan	183.887.413,00	183.887.413,00
1.001.03.01.0011	Kemudahan Penyusunan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Horse Unit)	182.314.425,00	182.314.425,00
1.001.03.01.0012	Kemudahan Penyusunan Meja dan Kursi Kerja-Kursi Pejabat-Meja Kerja Pejabat	187.206.843,00	187.206.843,00
1.001.03.01.0014	Kemudahan Penyusunan Meja dan Kursi Kerja-Kursi Pejabat-Meja Kerja Pejabat	7.875.300,00	7.875.300,00
1.001.03.01.0015	Kemudahan Penyusunan Meja dan Kursi Kerja-Kursi Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	18.890.423,00	18.890.423,00
1.001.03.01.0016	Kemudahan Penyusunan Meja dan Kursi Kerja-Kursi Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	14.481.300,00	14.481.300,00
1.001.03.01.0017	Kemudahan Penyusunan Meja dan Kursi Kerja-Kursi Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	228.158,00	228.158,00
1.001.03.01.0018	Kemudahan Penyusunan Meja dan Kursi Kerja-Kursi Pejabat-Lantai dan Atap Pejabat	14.035.000,00	14.035.000,00
1.001.03.02	Kemudahan Penyusunan Alat Studio, Komunikasi, dan Persewaan	271.191.600,00	271.191.600,00
1.001.03.02.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Studio-Persewaan Studio Audio	18.761.600,00	18.761.600,00
1.001.03.02.0002	Kemudahan Penyusunan Alat Studio-Persewaan Studio Video dan Foto	114.089.100,00	114.089.100,00
1.001.03.02.0004	Kemudahan Penyusunan Alat Studio-Persewaan Studio	18.880.000,00	18.880.000,00
1.001.03.02.0005	Kemudahan Penyusunan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	17.894.507,00	17.894.507,00
1.001.03.02.0007	Kemudahan Penyusunan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepon	10.418.800,00	10.418.800,00
1.001.03.02.0012	Kemudahan Penyusunan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio	15.400.000,00	15.400.000,00
1.001.03.02.0017	Kemudahan Penyusunan Telekomunikasi-Teknologi-Media dan Persewaan	29.000.000,00	29.000.000,00
1.001.03.03	Kemudahan Penyusunan Alat Kiblat-Kiblat dan Kiblat	16.119.200,00	16.119.200,00
1.001.03.03.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Kiblat-Kiblat dan Kiblat	16.119.200,00	16.119.200,00
1.001.03.04	Kemudahan Penyusunan Alat Laboratorium	18.872.952,00	18.872.952,00
1.001.03.04.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Persewaan	14.478.833,00	14.478.833,00
1.001.03.04.0002	Kemudahan Penyusunan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Persewaan	17.395.367,00	17.395.367,00
1.001.03.04.0004	Kemudahan Penyusunan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Persewaan Teknologi Telepon	14.022.117,00	14.022.117,00
1.001.03.04.0005	Kemudahan Penyusunan Alat Persewaan Persewaan-Alat Persewaan Persewaan	11.480.000,00	11.480.000,00
1.001.03.04.0007	Kemudahan Penyusunan Alat Persewaan Persewaan-Alat Persewaan Persewaan	17.730.867,00	17.730.867,00
1.001.03.04.0008	Kemudahan Penyusunan Alat Laboratorium-Alat Persewaan Persewaan	13.394.440,00	13.394.440,00
1.001.03.04.0009	Kemudahan Penyusunan Alat Laboratorium-Alat Persewaan Persewaan	19.025.800,00	19.025.800,00
1.001.03.05	Kemudahan Penyusunan Alat Persewaan	7.333.333,00	7.333.333,00
1.001.03.05.0001	Kemudahan Penyusunan Alat Persewaan-Alat Persewaan-Alat Persewaan	7.333.333,00	7.333.333,00
1.001.03.06	Kemudahan Penyusunan Komputer	11.311.322.384,00	11.311.322.384,00
1.001.03.06.0001	Kemudahan Penyusunan Komputer Unit-Komputer Jaringan	14.550.000,00	14.550.000,00
1.001.03.06.0002	Kemudahan Penyusunan Komputer Unit-Personal Computer	163.968.887,00	163.968.887,00
1.001.03.06.0004	Kemudahan Penyusunan Persewaan Komputer-Persewaan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00
1.001.03.06.0005	Kemudahan Penyusunan Persewaan Komputer-Persewaan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00
1.001.03.06.0006	Kemudahan Penyusunan Persewaan Komputer-Persewaan Komputer	172.253.887,00	172.253.887,00
1.001.03.06.0008	Kemudahan Penyusunan Persewaan Komputer-Persewaan Komputer Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	2021	2022
	JUMLAH KEWAJIBAN	356.795.390,00	1.863.561.000,00
X	EKUITAS	7.801.679.892,31	1.692.522.892,31
X1	EKUITAS	7.801.679.892,31	1.692.522.892,31
X1.01	Modal	(14.948.864.785,00)	(29.476.277.611,40)
X1.01.01	Ekuitas	1.692.522.892,31	4.032.396.274,97
X1.01.01.01	Ekuitas	1.692.522.892,31	4.032.396.274,97
X1.01.01.01.0001	Ekuitas	1.692.522.892,31	4.032.396.274,97
X1.01.02	Surplus/Defisit L/D	(26.241.187.673,00)	(24.438.677.676,07)
X1.01.02.01	Surplus/Defisit L/D	(26.241.187.673,00)	(24.438.677.676,07)
X1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit L/D	(26.241.187.673,00)	(24.438.677.676,07)
X1.01	Ekuitas sesuai Dikawatir/Defisit	25.549.135.779,31	21.149.899.293,91
X1.01.01	BR PERD	25.549.135.779,31	21.149.899.293,91
X1.01.01.01	BR PERD	25.549.135.779,31	21.149.899.293,91
X1.01.01.01.0001	BR PERD	25.549.135.779,31	21.149.899.293,91
	JUMLAH EKUITAS	7.801.679.892,31	1.692.522.892,31
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.802.437.242,31	3.757.893.892,31

Penerimaan Kas, 27 Januari 2022
 KEPALA DINAS PEMERIKSAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA


 R. HANUDDIN, S.H., M.H.
 NIP. 197310201990011000

LAZO-SAMPLO ZAROPAL





PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBUDIDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGATAN OPERASIONAL					
0	BERAN	20.341.187.679,00	24.088.637.676,07	(4.147.449.997,07)	(16,94)
0.1	BERAN OPERASI	20.341.187.679,00	24.181.804.805,02	(3.840.617.126,02)	(18,88)
0.1.01	Beban Pegawai	8.304.909.301,00	8.250.442.477,00	54.466.824,00	1,50
0.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.956.804.454,00	5.821.834.294,00	971.030.160,00	30,77
0.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.919.100.000,00	2.078.143.200,00	840.956.800,00	40,47
0.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.091.065.500,00	2.078.143.200,00	12.922.300,00	0,62
0.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	828.034.700,00	0,00	828.034.700,00	100,00
0.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	221.156.007,00	169.375.922,00	61.840.085,00	36,53
0.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	164.690.528,00	169.375.922,00	(4.685.394,00)	(2,78)
0.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	56.475.444,00	0,00	56.475.444,00	100,00
0.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	138.530.000,00	167.410.000,00	(28.880.000,00)	(17,25)
0.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	138.530.000,00	167.410.000,00	(28.880.000,00)	(19,25)
0.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	146.923.000,00	238.726.000,00	(91.803.000,00)	(38,46)
0.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	146.923.000,00	238.726.000,00	(91.803.000,00)	(38,46)
0.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.190.000,00	37.805.000,00	(69.385,00)	(0,18)
0.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.580.000,00	37.805.000,00	5.785.000,00	13,30
0.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55.600.000,00	0,00	55.600.000,00	100,00
0.1.01.01.06	Beban Tunjangan Retensi ASN	157.441.080,00	101.532.840,00	55.908.240,00	33,26
0.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Retensi PNS	103.120.080,00	101.532.840,00	1.587.240,00	1,57
0.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Retensi PPPK	54.321.000,00	0,00	54.321.000,00	100,00
0.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.301.301,00	16.529.471,00	(9.227.970,00)	(33,83)
0.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.301.301,00	16.529.471,00	(9.227.970,00)	(33,83)
0.1.01.01.08	Beban Penambahan Gaji ASN	52.422,00	31.798,00	20.624,00	64,54
0.1.01.01.08.0001	Beban Penambahan Gaji PNS	32.640,00	31.798,00	842,00	2,71
0.1.01.01.08.0002	Beban Penambahan Gaji PPPK	19.636,00	0,00	19.636,00	100,00
0.1.01.01.09	Beban Jarak Jauh/Kasualitas ASN	233.856.654,00	199.253.524,00	34.622.830,00	17,38
0.1.01.01.09.0001	Beban Jarak Jauh/Kasualitas PNS	195.631.665,00	199.253.524,00	(3.621.859,00)	(1,87)
0.1.01.01.09.0002	Beban Jarak Jauh/Kasualitas PPPK	37.944.451,00	0,00	37.944.451,00	100,00
0.1.01.01.10	Beban Jarak Jauh/Kasualitas Kerja ASN	6.321.181,00	4.268.110,00	2.052.071,00	48,07
0.1.01.01.10.0001	Beban Jarak Jauh/Kasualitas Kerja PNS	4.313.805,00	4.268.110,00	44.695,00	1,52
0.1.01.01.10.0002	Beban Jarak Jauh/Kasualitas Kerja PPPK	1.997.376,00	0,00	1.997.376,00	100,00
0.1.01.01.11	Beban Jarak Jauh/Kasualitas ASN	18.963.514,00	12.807.429,00	6.156.085,00	48,06
0.1.01.01.11.0001	Beban Jarak Jauh/Kasualitas PNS	13.031.440,00	12.807.429,00	224.011,00	1,71
0.1.01.01.11.0002	Beban Jarak Jauh/Kasualitas PPPK	5.961.874,00	0,00	5.961.874,00	100,00
0.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.436.642.366,00	5.778.396.183,00	(140.350.797,00)	(3,89)
0.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Status Kerja ASN	2.308.367.523,00	2.635.283.622,00	(126.916.099,00)	(4,82)
0.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Status Kerja PNS	2.568.367.523,00	2.635.283.622,00	(126.916.099,00)	(4,82)
0.1.01.02.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	500.073.730,00	594.186.203,00	(94.110.473,00)	(15,87)
0.1.01.02.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	500.073.730,00	594.186.203,00	(94.110.473,00)	(15,87)
0.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.429.602.133,00	2.548.734.358,00	(119.122.193,00)	(4,87)
0.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.429.602.133,00	2.548.734.358,00	(119.122.193,00)	(4,87)
0.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Peningkatan Objektif/Target ASN	0,00	452.212.000,00	(452.212.000,00)	(100,00)
0.1.01.03.02	Beban Honorarium	0,00	452.212.000,00	(452.212.000,00)	(100,00)
0.1.01.03.02.0001	Beban Honorarium Peningkat/growth/Target Peningkatan Kinerja	0,00	444.852.000,00	(444.852.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01.01.0002	Beban Honorarium Pengabdian Masyarakat	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
8.1.01	Beban Barang dan Jasa	10.946.277.839,00	14.724.362.328,02	(3.778.084.489,02)	(33,66)
8.1.01.01	Beban Barang	2.992.386.988,00	3.300.724.113,00	(308.337.125,00)	(9,31)
8.1.01.01.01	Beban Barang Pokok Hidup	2.992.386.988,00	3.296.928.113,00	(304.541.125,00)	(9,21)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	175.280.000,00	160.000.000,00	15.280.000,00	8,39
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	37.174.100,00	(37.174.100,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-lai Pabung Gas	0,00	1.470.000,00	(1.470.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	94.195.044,00	71.229.700,00	22.965.344,00	28,63
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.289.746,00	39.152.000,00	3.037.746,00	7,81
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Koran dan Cover	44.184.212,00	38.867.786,00	5.316.426,00	13,68
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	286.010.297,00	153.339.987,00	132.670.310,00	86,28
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.490.000,00	8.270.000,00	220.000,00	8,43
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penyediaan Dokumen/Administrasi Tender	9.950.572,00	8.267.540,00	1.683.032,00	7,33
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.411.373,00	22.469.300,00	10.942.073,00	46,30
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pembuat Kantor	10.579.924,00	20.608.600,00	(10.028.676,00)	(48,66)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.550.793,00	11.031.000,00	1.519.793,00	13,78
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perangkat Lunak Perangkat Cilik Raga	4.382.280,00	0,00	4.382.280,00	100,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Securit/Candera Main	244.835.570,00	23.010.000,00	219.224.970,00	85,99
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	109.521.220,00	1.024.605.200,00	(855.173.980,00)	(93,46)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	2.334.850,00	17.893.200,00	(15.558.350,00)	(66,75)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat (Obat Lain)	5.426.420,00	462.000,00	4.964.420,00	1.075,22
8.1.02.01.01.0039	Beban Haring untuk Dijual/Ditawarkan kepada Masyarakat	551.182.923,00	140.023.500,00	387.129.423,00	265,18
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Ditawarkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	179.685.025,00	0,00	179.685.025,00	100,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Nelayan dan Pakan Nelayan	254.122.517,00	950.000,00	(253.172.517,00)	(26,44),24
8.1.02.01.01.0045	Beban Nelayan dan Pakan Nelayan dan Pakan Lainnya	2.573.186,00	232.968.800,00	(229.395.614,00)	(98,47)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	419.067.400,00	705.142.000,00	(286.074.600,00)	(40,37)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51.711.000,00	12.110.000,00	39.601.000,00	190,27
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urus Kesehatan	56.438.000,00	95.951.000,00	(39.513.000,00)	(40,72)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	186.582.000,00	227.821.000,00	(39.239.000,00)	(17,23)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakan Dura Hutan (PDH)	10.349.000,00	0,00	10.349.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakan Dura Lapangan (PDL)	14.983.000,00	0,00	14.983.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakan Baku Tradisional	18.121.850,00	0,00	18.121.850,00	100,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakan Olahraga	98.152.450,00	211.513.000,00	(113.360.550,00)	(57,26)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	3.799.000,00	(3.799.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0009	Beban Pemeliharaan dan Merawat Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	3.799.000,00	(3.799.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	4.532.860.951,00	4.830.021.325,11	(298.051.384,11)	(9,17)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.860.966.572,00	4.358.253.866,00	(497.287.294,00)	(13,41)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembina, Moderator, Peninjau, Asesor, dan Penilai	269.200.000,00	414.200.000,00	(145.000.000,00)	(35,02)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekelompok Tim Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	0,00	51.900.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyelidikan atau Penyelenggaraan	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Penyakit dan Serius Urus	0,00	3.019.000,00	(3.019.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesehatan dan Kesejahteraan	15.992.500,00	8.000.000,00	7.992.500,00	55,47
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	828.759.412,00	1.785.831.286,00	(957.071.874,00)	(25,85)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Urus	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	247.182.800,00	155.680.000,00	91.502.800,00	(30,79)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kesejahteraan	38.991.185,00	0,00	38.991.185,00	100,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	499.921.800,00	0,00	499.921.800,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kesalahan / Poinrasan	%
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Film/Rokinet, Film, dan Peremetaan	1.099.330.000,00	1.394.251.600,00	(334.721.000,00)	(24,01)
8.1.02.02.01.0058	Beban Tagihan Telepon	2.000.500,00	2.000.600,00	(4.100,00)	(0,15)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.700.595,00	2.011.143,00	(310.548,00)	(17,89)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	179.110.388,00	164.608.337,00	14.502.051,00	8,03
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Secu Kabar/Majalah	14.664.000,00	24.600.000,00	(9.936.000,00)	(40,39)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimil/Telekom/TV Berlangganan	20.491.540,00	50.703.800,00	(24.270.260,00)	(47,81)
8.1.02.02.01.0067	Beban Fasilitas Pngk. Doc. dan Pericinan	10.136.372,00	2.819.300,00	7.657.072,00	303,14
8.1.02.02.01.0073	Beban Madras Check Up	7.426.000,00	16.950.000,00	(9.524.000,00)	(56,19)
8.1.02.02.01.0080	Beban Himmaman Penanggung Jawab Pengkasa Kemangan	400.036.300,00	0,00	400.036.300,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Himmaman Pengkasan Berpengkasan	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Jasa Jaminan Asuransi	41.786.482,00	90.343.818,00	(48.557.336,00)	(55,85)
8.1.02.02.02.0003	Beban Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.816.284,00	79.774.912,00	(42.958.628,00)	(55,85)
8.1.02.02.02.0006	Beban Jasa Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	5.256.915,00	4.568.906,00	(2.577.477,00)	(57,85)
8.1.02.02.02.0007	Beban Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.761.274,00	5.960.004,00	(3.221.830,00)	(55,85)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	220.003.000,00	143.073.000,00	76.928.500,00	33,29
8.1.02.02.04.0030	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	191.724.300,00	88.240.000,00	93.484.300,00	103,94
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	12.740.000,00	(12.740.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apang Bermotor untuk Penumpang	0,00	393.000,00	(393.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0113	Beban Sewa Alat Reproduksi (Pengangkutan)	31.479.000,00	42.000.000,00	(3.521.000,00)	(9,16)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	108.257.782,00	233.240.111,11	(124.982.329,11)	(55,39)
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	123.400.000,00	(123.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.930.000,00	47.835.111,11	2.094.888,89	6,20
8.1.02.02.05.0056	Beban Sewa Tamu	6.094.000,00	5.709.000,00	385.000,00	6,23
8.1.02.02.05.0057	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	2.343.182,00	29.580.000,00	(27.236.818,00)	(94,51)
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	17.424.000,00	(17.424.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	240.135.794,00	0,00	240.135.794,00	100,00
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	49.922.694,00	0,00	49.922.694,00	100,00
8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	190.233.100,00	0,00	190.233.100,00	100,00
8.1.02.02.12	Beban Kemas/Pelatihan, Seminarsi, Himpunan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	61.500.000,00	5.500.000,00	56.000.000,00	1.058,18
8.1.02.02.12.0006	Beban Kemas/Pelatihan	61.500.000,00	5.500.000,00	56.000.000,00	1.058,18
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	135.009.220,00	583.244.868,91	(448.235.648,91)	(76,88)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.351.160,00	88.908.000,00	(15.556.840,00)	(9,33)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.926.634,00	55.772.000,00	(10.845.366,00)	(19,45)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Peralatan	11.481.800,00	6.100.000,00	5.381.800,00	86,23
8.1.02.03.02.0400	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Utilis-Personal Computer	18.942.626,00	7.016.000,00	11.926.626,00	169,23
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.658.060,00	514.256.868,91	(454.598.808,91)	(68,40)
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	59.658.060,00	514.256.868,91	(454.598.808,91)	(68,40)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.281.611.680,00	2.082.371.511,00	(720.759.831,00)	(56,00)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.281.611.680,00	2.082.371.511,00	(720.759.831,00)	(56,00)
8.1.02.04.01.0006	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.274.288.381,00	1.933.601.511,00	(661.390.130,00)	(51,17)
8.1.02.04.01.0009	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	18.700.000,00	(18.700.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.01.0014	Beban Perjalanan Dinas Picket Meeting Dalam Kota	0,00	41.100.000,00	(41.100.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.01.0015	Beban Perjalanan Dinas Picket Meeting Luar Kota	7.410.299,00	7.128.000,00	282.299,00	1,24
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.003.400.000,00	4.000.000.000,00	(2.004.600.000,00)	(50,01)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.003.400.000,00	4.000.000.000,00	(2.004.600.000,00)	(50,01)
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.003.400.000,00	4.000.000.000,00	(2.004.600.000,00)	(50,01)
8.1.06	Beban Utang	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Komunitas yang Berbasis Hakasi Perempuan	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.341.187.679,00	24.187.804.809,03	(3.846.617.126,02)	(15,89)
8.1.08	BERAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	306.832.871,05	(306.832.871,05)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	243.544.022,97	(243.544.022,97)	(100,00)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	243.544.022,97	(243.544.022,97)	(100,00)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Taret Pemutar Kuchanan Dinas Pemadam Pemadam	0,00	243.544.022,97	(243.544.022,97)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	13.769.610,00	(13.769.610,00)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	13.769.610,00	(13.769.610,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	13.769.610,00	(13.769.610,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	0,00	36.892.996,08	(36.892.996,08)	(100,00)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	36.892.996,08	(36.892.996,08)	(100,00)
8.1.08.03.02.0001	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Perantara Irigasi	0,00	36.892.996,08	(36.892.996,08)	(100,00)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	12.626.242,08	(12.626.242,08)	(100,00)
8.1.08.04.02	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Ruminasi	0,00	12.626.242,08	(12.626.242,08)	(100,00)
8.1.08.04.02.0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Ruminasi	0,00	12.626.242,08	(12.626.242,08)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	306.832.871,05	(306.832.871,05)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	20.341.187.679,00	24.494.637.676,07	(4.147.449.997,07)	(16,94)
	SURPLUS/DEFISI-LO	(20.341.187.679,00)	(24.494.637.676,07)	4.147.449.997,07	(16,94)

Provinsi Kepulauan Riau, 27 Januari 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

BURHANUDDIN, S.Hut. M.H.
NIP.197103201980311008

WAKIL-UL-AMMAH





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.892.522.992,51	4.017.368.518,11
Surplus / (Defisit) - LO	(20.241.187.679,00)	(24.888.617.876,07)
EK PPKD	23.680.335.770,00	23.148.800.293,81
DAMPAK KUMILATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	(35.44)
EKUITAS AKHIR	7.031.675.992,51	1.892.522.992,51

Provinsi Kepulauan Riau, 27 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA


MURHANUDDIN, s.Hut., M.H.
NIP.197101201998031008

BAB I

PENDAHULUAN

The logo of the Province of Riau is a large, faint watermark in the background. It features a shield with a yellow border. Inside the shield, there is a yellow sailboat on blue wavy lines representing water. The words "PROVINSI KEPULAUAN RIAU" are written in a semi-circle above the sailboat. The shield is flanked by a yellow palm branch on the left and a yellow string of beads on the right. Below the shield is a yellow banner.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:



1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;



4. Pendapatan;
5. Belanja;

1.2 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 adalah tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.



1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10170);
18. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068).

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- 2.1 Sumber Daya Manusia
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap



4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB II

PROFIL SKPD

2.1 Sumber Daya

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;



6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan pada masing-masing unit kerja pada Dinas P3AP2KB adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;



- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. Penyusunan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- b. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. Penyusunan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;



- f. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. Penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan;
- b. Pelaksanaan pemetaan Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Penyiapan upaya advokasi, sosialisasi, edukasi tentang Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- d. Pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan;



- g. Pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan terhadap iklim usaha bidang ekonomi;
- j. Pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait perlindungan khusus anak;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait perlindungan khusus anak;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;



- f. Pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap



Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- b. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penyediaan Data;
- j. Pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan hak perempuan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan pemetaan pengendalian penduduk tingkat provinsi kepulauan riau;
- c. Pelaksanaan analisis parameter pengendalian penduduk;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, KIE dan peningkatan kapasitas terkait pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan desain program pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pembinaan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. Pelaksanaan penguatan jejaring, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi stakeholder dan organisasi kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat Provinsi dalam pembangunan keluarga;
- i. Pengelolaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



6. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah organisasi/unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan teknis menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk tidak pidana perdagangan orang.

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan dan Korban TPPO. Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan Korban;
- c. Pengelolaan Kasus;
- d. Penampungan Sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan Korban.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI:
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tipe A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAHATRIKAS-0011 : PROKOTRIKAS : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TASRIKAS : 12 TAHUN 2023
12 JUNE 2023



KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



2.1.2 Sumber Daya Manusia

Suatu Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia nya dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Berdasarkan data status kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2025, total jumlah pegawai adalah 82 orang. PNS sebanyak 36 orang (43,90%), PPPK Tahap 1 sebanyak 40 orang (48,78%) dan PPPK Tahap 2 sebanyak 6 orang (7,32%).



Dari total 82 orang pegawai, mayoritas adalah perempuan. Sebanyak 61 orang (74,39%), pegawai perempuan dan sebanyak 21 orang (25,61%) pegawai laki-laki.





2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan alam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Strategi pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 meliputi:

1. Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender pada lembaga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peningkatan kualitas perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
3. Peningkatan kualitas penyedia pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
5. Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
6. Peningkatan pelibatan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan terhadap perempuan dan anak;
7. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dan dunia usaha dalam pelembagaan pemenuhan hak anak;
8. Penguatan dan pengembangan kelembagaan forum anak di daerah;
9. Peningkatan kualitas penyedia pelayanan perlindungan khusus anak;
10. Peningkatan kualitas koordinasi dan kebijakan dalam pengendalian kuantitas penduduk;
11. Peningkatan kualitas pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;



12. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan;
13. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov Kepulauan Riau.

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dalam advokasi dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PUG;
2. Penguatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi;
3. Peningkatan KIE dan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Memperkuat pelaksanaan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak yang didukung dengan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
5. Memperkuat koordinasi dan pengembangan aplikasi dalam pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak di perangkat daerah;
6. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;



7. Pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
8. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan forum anak;
9. Peningkatan keterampilan SDM dan penambahan sarana prasarana pelayanan perlindungan khusus anak;
10. Memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk;
11. Memperkuat advokasi dan KIE dalam pengembangan program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja dengan memanfaatkan kearifan budaya lokal;

2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tingkat pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 berdasarkan realisasi belanja adalah Rp 25.691.508.379,00 (93,47%) dari alokasi anggaran sebesar Rp 27.485.967.298,00. Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				%
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,507,130,146	12,099,990,979	121,256,800	120,397,200	96.77%
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198,892,900	152,398,626	0	0	76.62%
1	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133,199,200	104,420,525	0	0	78.39%
2	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29,426,100	28,865,101	0	0	98.09%
3	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36,267,600	19,113,000	0	0	52.70%
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,066,736,185	9,799,613,340	0	0	97.35%
1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,655,029,885	9,394,909,840	0	0	97.31%



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				%
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408,302,000	401,396,500	0	0	98.31%
3	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,404,300	3,307,000	0	0	97.14%
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	622,660,282	578,968,196	121,256,800	120,397,200	94.01%
1	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,015,400	9,556,595	0	0	95.42%
2	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,768,200	5,540,400	97,568,800	97,087,200	92.18%
3	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,133,892	18,598,467	23,688,000	23,310,000	97.87%
4	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,924,900	39,635,099	0	0	99.27%
5	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	334,495,600	332,798,019	0	0	99.49%
6	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,770,000	14,664,000	0	0	99.28%
7	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,552,290	158,175,616	0	0	83.01%
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,278,168,580	1,248,091,720	0	0	97.65%
1	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,210,000	87,075,640	0	0	96.53%
2	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,000,000	38,479,000	0	0	91.62%
3	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,145,958,580	1,122,537,080	0	0	97.96%
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340,672,199	320,919,097	0	0	94.20%
1	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165,581,200	155,923,502	0	0	94.17%
2	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115,080,999	105,337,535	0	0	91.53%
3	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,010,000	59,658,060	0	0	99.41%
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	865,726,115	719,459,695	0	0	83.10%
	Keg. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	50,000,000	16,986,450	0	0	33.97%



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				%
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	50,000,000	16,986,450	0	0	33.97%
	Keg. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	815,726,115	702,473,245	0	0	86.12%
1	Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	29,636,200	10,879,500	0	0	36.71%
2	Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	786,089,915	691,593,745	0	0	87.98%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	781,043,229	643,260,240	0	0	82.36%
	Keg. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	242,328,850	123,868,280	0	0	51.12%
1	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50,808,000	50,777,580	0	0	99.94%
2	Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	191,520,850	73,090,700	0	0	38.16%
	Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	538,714,379	519,391,960	0	0	96.41%
1	Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	469,694,379	452,413,560	0	0	96.32%
2	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	69,020,000	66,978,400	0	0	97.04%



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				%
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,814,930,080	1,774,742,851	0	0	97.79%
	Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1,614,930,080	1,595,086,742	0	0	98.77%
1	Sub Keg. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1,614,930,080	1,595,086,742	0	0	98.77%
	Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	200,000,000	179,656,109	0	0	89.83%
1	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	200,000,000	179,656,109	0	0	89.83%
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	572,151,400	276,246,067	0	0	48.28%
	Keg. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	50,000,000	18,416,449	0	0	36.83%
1	Sub Keg. Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	50,000,000	18,416,449	0	0	36.83%
	Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	522,151,400	257,829,618	0	0	49.38%
1	Sub Keg. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	247,118,800	171,340,040	0	0	69.34%
2	Sub Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	275,032,600	86,489,578	0	0	31.45%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	190,912,000	188,560,142	0	0	98.77%
	Keg. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50,692,000	49,688,942	0	0	98.02%
1	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50,692,000	49,688,942	0	0	98.02%



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				%
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
	Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140,220,000	138,871,200	0	0	99.04%
1	Sub Keg. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	140,220,000	138,871,200	0	0	99.04%
	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	926,697,366	839,156,399	4,120,630,082	3,537,469,090	86.71%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	182,728,035	175,877,338	0	0	96.25%
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,860,800	8,766,000	0	0	88.90%
1	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750,800	740,000	0	0	98.56%
2	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,110,000	8,026,000	0	0	88.10%
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117,357,635	112,212,843	0	0	95.62%
1	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,357,635	112,212,843	0	0	95.62%
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,509,600	54,898,495	0	0	98.90%
1	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,100,000	43,512,870	0	0	98.67%
2	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,409,600	11,385,625	0	0	99.79%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	506,381,389	431,268,661	2,432,939,249	2,123,260,600	86.91%
	Keg. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	506,381,389	431,268,661	2,432,939,249	2,123,260,600	86.91%
1	Sub Keg. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140,361,200	138,776,600	0	0	98.87%



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				%
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	366,020,189	292,492,061	2,432,939,249	2,123,260,600	86.31%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	237,587,942	232,010,400	1,687,690,833	1,414,208,490	85.51%
	Keg. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	237,587,942	232,010,400	1,687,690,833	1,414,208,490	85.51%
1	Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	237,587,942	232,010,400	1,687,690,833	1,414,208,490	85.51%
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	53,037,337,500	5,234,501,266	0	0	9.87%
	Keg. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,295,723,750	1,227,101,266	0	0	94.70%
1	Sub Keg. Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1,295,723,750	1,227,101,266	0	0	94.70%
	Keg. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4,008,010,000	4,007,400,000	0	0	99.98%
1	Sub Keg. Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	4,008,010,000	4,007,400,000	0	0	99.98%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	281,756,330	257,724,450	0	0	91.47%
	Keg. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	281,756,330	257,724,450	0	0	91.47%



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				%
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	Sub Keg. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	200,000,000	182,382,860	0	0	91.19%
2	Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	81,756,330	75,341,590	0	0	92.15%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Target Pendapatan

Tidak ada Target Pendapatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 karena bukan dinas yang menganggarkan pendapatan.

2. Target Belanja

Pencapaian Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 25,691,508,379.00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 22,033,642,089.00 (tercapai sebesar 94.79%) dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 3,657,866,290.00 (tercapai sebesar 86.23%) yang menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:



Pencapaian Target berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
BELANJA DAERAH	27,485,967,298.00	25,691,508,379.00	93.47
BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79
Belanja Pegawai	9,655,029,885.00	9,394,909,840.00	97.31
Belanja Barang dan Jasa	13,589,050,531.00	12,638,732,249.00	93.01
Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79
BELANJA MODAL	4,241,886,882.00	3,657,866,290.00	86.23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348,083,775.00	322,712,290.00	92.71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
JUMLAH BELANJA MODAL	4,241,886,882.00	3,657,866,290.00	86.23
JUMLAH BELANJA	27,485,967,298.00	25,691,508,379.00	93.47

Pencapaian Target Belanja berdasarkan Sub Rincian Objek Tahun Anggaran 2025

BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79
Belanja Pegawai	9,655,029,885.00	9,394,909,840.00	97.31
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,120,098,390.00	3,956,864,454.00	96.04
Belanja Gaji Pokok ASN	3,004,355,424.00	2,919,100,000.00	97.16
Belanja Gaji Pokok PNS	2,137,073,524.00	2,091,065,300.00	97.85
Belanja Gaji Pokok PPPK	867,281,900.00	828,034,700.00	95.47
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	239,089,822.00	231,166,002.00	96.69
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165,252,342.00	164,690,558.00	99.66
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	73,837,480.00	66,475,444.00	90.03
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141,230,000.00	138,530,000.00	98.09
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141,230,000.00	138,530,000.00	98.09
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	147,801,000.00	146,923,000.00	99.41
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	147,801,000.00	146,923,000.00	99.41
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99,795,000.00	97,190,000.00	97.39
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43,975,000.00	43,590,000.00	99.12
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55,820,000.00	53,600,000.00	96.02
Belanja Tunjangan Beras ASN	161,931,120.00	157,441,080.00	97.23
Belanja Tunjangan Beras PNS	103,488,180.00	103,126,080.00	99.65
Belanja Tunjangan Beras PPPK	58,442,940.00	54,315,000.00	92.94



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7,382,088.00	7,301,501.00	98.91
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,382,088.00	7,301,501.00	98.91
Belanja Pembulatan Gaji ASN	54,813.00	52,322.00	95.46
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33,629.00	32,666.00	97.14
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21,184.00	19,656.00	92.79
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	253,153,918.00	233,876,054.00	92.38
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	213,199,456.40	195,931,603.00	91.90
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	39,954,461.60	37,944,451.00	94.97
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6,444,589.00	6,321,181.00	98.09
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4,360,817.00	4,333,805.00	99.38
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2,083,772.00	1,987,376.00	95.37
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19,333,517.00	18,963,314.00	98.09
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13,082,473.00	13,001,440.00	99.38
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6,251,044.00	5,961,874.00	95.37
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	39,527,099.00	0.00	0.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	39,527,099.00	0.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,534,931,495.00	5,438,045,386.00	98.25
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,550,022,231.00	2,508,367,523.00	98.37
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,550,022,231.00	2,508,367,523.00	98.37
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	516,816,466.00	500,075,730.00	96.76
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	516,816,466.00	500,075,730.00	96.76
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2,468,092,798.00	2,429,602,133.00	98.44
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2,468,092,798.00	2,429,602,133.00	98.44
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa	13,589,050,531.00	12,638,732,249.00	93.01
Belanja Barang	3,157,888,536.00	2,919,100,398.00	92.44
Belanja Barang Pakai Habis	3,149,891,336.00	2,919,100,398.00	92.67
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	174,231,400.00	173,280,000.00	99.45
Belanja Bahan-Bahan Baku	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	94,884,200.00	94,195,044.00	99.27
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43,627,295.00	42,209,746.00	96.75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45,098,500.00	44,184,212.00	97.97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	291,824,120.00	232,973,707.00	79.83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,546,000.00	8,490,000.00	99.34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	11,425,577.00	9,950,372.00	87.09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34,603,000.00	33,411,375.00	96.56
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14,440,975.00	10,579,924.00	73.26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13,763,000.00	12,550,795.00	91.19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4,389,000.00	4,382,280.00	99.85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	245,883,615.00	244,835,570.00	99.57
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	204,279,500.00	169,521,220.00	82.98
Belanja Obat-Obatan-Obat	2,375,500.00	2,374,850.00	99.97
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6,056,200.00	5,436,430.00	89.77
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	535,820,500.00	533,182,925.00	99.51



*Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	179,130,000.00	178,685,025.00	99.75
Belanja Natura dan Pakan-Natura	256,416,054.00	254,122,517.00	99.11
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3,750,500.00	3,573,106.00	95.27
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	461,660,000.00	419,067,400.00	90.77
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36,150,000.00	35,735,000.00	98.85
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	88,413,600.00	56,828,000.00	64.28
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	205,900,000.00	167,332,000.00	81.27
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50,400,000.00	50,349,600.00	99.90
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15,000,000.00	14,985,000.00	99.90
Belanja Pakaian Batik Tradisional	18,150,000.00	18,131,850.00	99.90
Belanja Pakaian Olahraga	103,672,800.00	98,732,450.00	95.23
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7,997,200.00	0.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7,997,200.00	0.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa	4,687,933,576.00	4,256,369,951.00	90.79
Belanja Jasa Kantor	3,978,031,915.00	3,584,466,592.00	90.11
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	292,700,000.00	269,200,000.00	91.97
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	144,000,000.00	144,000,000.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1,680,000.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14,000,000.00	13,992,500.00	99.95
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	846,710,625.00	828,759,412.00	97.88
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	66,200,000.00	66,200,000.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	256,398,400.00	247,182,800.00	96.41



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35,993,950.00	35,991,185.00	99.99
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500,000,000.00	499,921,800.00	99.98
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,083,461,400.00	783,030,000.00	72.27
Belanja Tagihan Telepon	3,672,000.00	2,685,500.00	73.13
Belanja Tagihan Air	2,887,500.00	1,700,595.00	58.90
Belanja Tagihan Listrik	182,581,740.00	179,168,388.00	98.13
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14,760,000.00	14,664,000.00	99.35
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51,900,000.00	26,491,540.00	51.04
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11,437,800.00	10,156,372.00	88.80
Belanja Medical Check Up	8,952,000.00	7,426,000.00	82.95
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400,036,500.00	400,036,500.00	100.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000.00	1,360,000.00	16.67
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47,254,005.00	41,786,483.00	88.43
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	42,275,140.00	36,816,284.00	87.09
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,217,370.00	2,208,975.00	99.62
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,761,495.00	2,761,224.00	99.99
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	233,443,000.00	220,203,300.00	94.33
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	190,800,000.00	181,724,300.00	95.24
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	643,000.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	42,000,000.00	38,479,000.00	91.62
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	110,992,000.00	108,257,782.00	97.54
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90
Belanja Sewa Taman	6,240,000.00	6,064,600.00	97.19
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
Belanja Sewa Hotel	4,752,000.00	2,243,182.00	47.21



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	244,412,656.00	240,155,794.00	98.26
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50,000,000.00	49,922,694.00	99.85
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	194,412,656.00	190,233,100.00	97.85
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	73,800,000.00	61,500,000.00	83.33
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	73,800,000.00	61,500,000.00	83.33
Belanja Pemeliharaan	184,340,999.00	174,250,220.00	94.53
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124,340,999.00	114,592,160.00	92.16
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	89,990,999.00	84,167,674.00	93.53
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11,590,000.00	11,481,810.00	99.07
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22,760,000.00	18,942,676.00	83.23
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,000,000.00	59,658,060.00	99.43
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	60,000,000.00	59,658,060.00	99.43
Belanja Perjalanan Dinas	1,550,887,420.00	1,281,611,680.00	82.64
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,550,887,420.00	1,281,611,680.00	82.64
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,540,223,420.00	1,274,201,381.00	82.73
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	0.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	0.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,664,000.00	7,410,299.00	69.49
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,008,000,000.00	4,007,400,000.00	99.99
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,008,000,000.00	4,007,400,000.00	99.99
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4,008,000,000.00	4,007,400,000.00	99.99



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79
BELANJA MODAL	4,241,886,882.00	3,657,866,290.00	86.23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348,083,775.00	322,712,290.00	92.71
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	229,161,195.00	220,398,040.00	96.18
Belanja Modal Alat Kantor	58,512,207.00	56,114,350.00	95.90
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	55,500,000.00	53,596,350.00	96.57
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3,012,207.00	2,518,000.00	83.59
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	162,656,988.00	156,455,890.00	96.19
Belanja Modal Mebel	88,696,688.00	83,537,490.00	94.18
Belanja Modal Alat Pendingin	39,172,300.00	38,784,450.00	99.01
Belanja Modal Alat Dapur	1,665,000.00	1,450,000.00	87.09
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28,128,000.00	27,705,600.00	98.50
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4,995,000.00	4,978,350.00	99.67
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7,992,000.00	7,827,800.00	97.95
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1,332,000.00	1,190,000.00	89.34
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6,660,000.00	6,637,800.00	99.67
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8,880,000.00	8,769,000.00	98.75
Belanja Modal Alat Studio	8,880,000.00	8,769,000.00	98.75
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8,880,000.00	8,769,000.00	98.75
Belanja Modal Komputer	110,042,580.00	93,545,250.00	85.01



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Modal Komputer Unit	90,728,700.00	79,864,500.00	88.03
Belanja Modal Personal Computer	90,728,700.00	79,864,500.00	88.03
Belanja Modal Peralatan Komputer	19,313,880.00	13,680,750.00	70.83
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13,732,800.00	8,180,700.00	59.57
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,581,080.00	5,500,050.00	98.55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
Belanja Modal Bangunan Gedung	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
Belanja Modal Buku Umum	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
JUMLAH BELANJA MODAL	4,241,886,882.00	3,657,866,290.00	86.23
JUMLAH BELANJA	27,485,967,298.00	25,691,508,379.00	93.47

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang sudah optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp 27.485.967.298,00 terserap sebesar Rp 25.691.508.379,00 atau 93,47%.



3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa sub kegiatan yang tingkat capaiannya belum maksimal karena terdapat hambatan dan kendala, sehingga mempengaruhi tingkat capaian keuangan secara keseluruhan. Adapun beberapa hambatan dan kendala yang terjadi seperti:

1. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan;
2. Adanya selisih harga antara SSH di DPA dengan harga satuan di pengadaan melalui e purchasing;
3. Ada beberapa LS Belanja Barang Jasa yang mengalami tunda bayar sehingga belum terealisasi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

The logo of the Province of Riau is a shield-shaped emblem. It features a central white sailboat on a blue base, surrounded by a yellow wreath. The text "PROVINSI KEPULAUAN RIAU" is written in a semi-circle above the shield. Below the shield is a yellow banner with the text "BERPADANG KANCAH BERSAMU MASYARAKAT".

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*):

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat



kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas



yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :



- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD;
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) Timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.



- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain PAD Yang Sah-LRA.

4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.



Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat



terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan-LRA

Tidak ada anggaran dan realisasi pendapatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2025.

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5	BELANJA DAERAH	27,485,967,298.00	25,691,508,379.00	93.47
5.1	BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79
5.1.01	Belanja Pegawai	9,655,029,885.00	9,394,909,840.00	97.31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,589,050,531.00	12,638,732,249.00	93.01
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79
5.2	BELANJA MODAL	4,241,886,882.00	3,657,866,290.00	86.23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348,083,775.00	322,712,290.00	92.71
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4,241,886,882.00	3,657,866,290.00	86.23
	JUMLAH BELANJA	27,485,967,298.00	25,691,508,379.00	93.47



1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 22,033,642,089.00 atau 94.79% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 23,244,080,416.00.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5	BELANJA DAERAH	27,485,967,298.00	25,691,508,379.00	93.47
5.1	BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79
5.1.01	Belanja Pegawai	9,655,029,885.00	9,394,909,840.00	97.31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,589,050,531.00	12,638,732,249.00	93.01
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23,244,080,416.00	22,033,642,089.00	94.79

Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01	Belanja Pegawai	9,655,029,885	9,394,909,840	97.31	9,256,442,477

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp 9,394,909,840.00 atau 97.31% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 9,655,029,885.00. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan. Belanja Pegawai yang termasuk dalam



Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, sesuai dengan yang tertera di bawah ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01	Belanja Pegawai	9,655,029,885.00	9,394,909,840.00	97.31
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,120,098,390.00	3,956,864,454.00	96.04
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,004,355,424.00	2,919,100,000.00	97.16
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,137,073,524.00	2,091,065,300.00	97.85
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	867,281,900.00	828,034,700.00	95.47
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	239,089,822.00	231,166,002.00	96.69
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165,252,342.00	164,690,558.00	99.66
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	73,837,480.00	66,475,444.00	90.03
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141,230,000.00	138,530,000.00	98.09
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141,230,000.00	138,530,000.00	98.09
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	147,801,000.00	146,923,000.00	99.41
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	147,801,000.00	146,923,000.00	99.41
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99,795,000.00	97,190,000.00	97.39
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43,975,000.00	43,590,000.00	99.12
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55,820,000.00	53,600,000.00	96.02
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	161,931,120.00	157,441,080.00	97.23
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	103,488,180.00	103,126,080.00	99.65
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	58,442,940.00	54,315,000.00	92.94
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7,382,088.00	7,301,501.00	98.91
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,382,088.00	7,301,501.00	98.91
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54,813.00	52,322.00	95.46
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33,629.00	32,666.00	97.14
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21,184.00	19,656.00	92.79



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	253,153,918.00	233,876,054.00	92.38
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	213,199,456.40	195,931,603.00	91.90
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	39,954,461.60	37,944,451.00	94.97
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6,444,589.00	6,321,181.00	98.09
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4,360,817.00	4,333,805.00	99.38
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2,083,772.00	1,987,376.00	95.37
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19,333,517.00	18,963,314.00	98.09
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13,082,473.00	13,001,440.00	99.38
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6,251,044.00	5,961,874.00	95.37
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	39,527,099.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	39,527,099.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,534,931,495.00	5,438,045,386.00	98.25
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,550,022,231.00	2,508,367,523.00	98.37
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,550,022,231.00	2,508,367,523.00	98.37
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	516,816,466.00	500,075,730.00	96.76
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	516,816,466.00	500,075,730.00	96.76
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2,468,092,798.00	2,429,602,133.00	98.44



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00

b) Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,589,050,531.00	12,638,732,249.00	93.01	12,678,875,216.91

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp 12,638,732,249.00 atau 93.01% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 13,589,050,531.00. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang dan Jasa ini mencakup: Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Belanja Persediaan Dokumen/Administrasi Tender, Belanja Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga, Belanja



Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Obat-Obatan-Obat, Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Pakaian Olahraga, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Medical Check Up, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi,



Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, seperti yang tertera di bawah ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,589,050,531.00	12,638,732,249.00	93.01
5.1.02.01	Belanja Barang	3,157,888,536.00	2,919,100,398.00	92.44
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,149,891,336.00	2,919,100,398.00	92.67
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	174,231,400.00	173,280,000.00	99.45
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	94,884,200.00	94,195,044.00	99.27
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43,627,295.00	42,209,746.00	96.75
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas	45,098,500.00	44,184,212.00	97.97
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	291,824,120.00	232,973,707.00	79.83
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,546,000.00	8,490,000.00	99.34
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	11,425,577.00	9,950,372.00	87.09
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34,603,000.00	33,411,375.00	96.56
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14,440,975.00	10,579,924.00	73.26
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13,763,000.00	12,550,795.00	91.19
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4,389,000.00	4,382,280.00	99.85
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	245,883,615.00	244,835,570.00	99.57



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	204,279,500.00	169,521,220.00	82.98
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2,375,500.00	2,374,850.00	99.97
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6,056,200.00	5,436,430.00	89.77
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	535,820,500.00	533,182,925.00	99.51
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	179,130,000.00	178,685,025.00	99.75
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	256,416,054.00	254,122,517.00	99.11
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3,750,500.00	3,573,106.00	95.27
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	461,660,000.00	419,067,400.00	90.77
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36,150,000.00	35,735,000.00	98.85
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	88,413,600.00	56,828,000.00	64.28
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	205,900,000.00	167,332,000.00	81.27
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50,400,000.00	50,349,600.00	99.90
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	15,000,000.00	14,985,000.00	99.90
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18,150,000.00	18,131,850.00	99.90
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	103,672,800.00	98,732,450.00	95.23
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7,997,200.00	0.00	0.00
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7,997,200.00	0.00	0.00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4,687,933,576.00	4,256,369,951.00	90.79
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,978,031,915.00	3,584,466,592.00	90.11



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	292,700,000.00	269,200,000.00	91.97
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	144,000,000.00	144,000,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1,680,000.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14,000,000.00	13,992,500.00	99.95
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	846,710,625.00	828,759,412.00	97.88
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	66,200,000.00	66,200,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	256,398,400.00	247,182,800.00	96.41
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35,993,950.00	35,991,185.00	99.99
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500,000,000.00	499,921,800.00	99.98
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1,083,461,400.00	783,030,000.00	72.27
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3,672,000.00	2,685,500.00	73.13
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2,887,500.00	1,700,595.00	58.90
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	182,581,740.00	179,168,388.00	98.13
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14,760,000.00	14,664,000.00	99.35
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51,900,000.00	26,491,540.00	51.04
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11,437,800.00	10,156,372.00	88.80
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	8,952,000.00	7,426,000.00	82.95
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400,036,500.00	400,036,500.00	100.00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000.00	1,360,000.00	16.67
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47,254,005.00	41,786,483.00	88.43
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	42,275,140.00	36,816,284.00	87.09



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,217,370.00	2,208,975.00	99.62
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,761,495.00	2,761,224.00	99.99
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	233,443,000.00	220,203,300.00	94.33
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	190,800,000.00	181,724,300.00	95.24
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	643,000.00	0.00	0.00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	42,000,000.00	38,479,000.00	91.62
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	110,992,000.00	108,257,782.00	97.54
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	6,240,000.00	6,064,600.00	97.19
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4,752,000.00	2,243,182.00	47.21
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	244,412,656.00	240,155,794.00	98.26
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50,000,000.00	49,922,694.00	99.85
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	194,412,656.00	190,233,100.00	97.85
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	73,800,000.00	61,500,000.00	83.33
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	73,800,000.00	61,500,000.00	83.33
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	184,340,999.00	174,250,220.00	94.53



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124,340,999.00	114,592,160.00	92.16
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	89,990,999.00	84,167,674.00	93.53
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11,590,000.00	11,481,810.00	99.07
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22,760,000.00	18,942,676.00	83.23
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,000,000.00	59,658,060.00	99.43
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	60,000,000.00	59,658,060.00	99.43
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,550,887,420.00	1,281,611,680.00	82.64
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,550,887,420.00	1,281,611,680.00	82.64
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,540,223,420.00	1,274,201,381.00	82.73
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,664,000.00	7,410,299.00	69.49
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,008,000,000.00	4,007,400,000.00	99.99
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,008,000,000.00	4,007,400,000.00	99.99
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4,008,000,000.00	4,007,400,000.00	99.99



c. Belanja Hibah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 tidak menganggarkan belanja hibah.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00

d. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,657,866,290.00 atau 86,23% dari anggaran belanja modal yang disediakan sebesar Rp 4.241.886.882,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki anggaran belanja modal tanah selama tahun anggaran 2025 sehingga realisasi nya 0.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini



meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp 322,712,290.00 atau 92,71% dari anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp 348,083,775.00.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348,083,775.00	322,712,290.00	92.71
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	229,161,195.00	220,398,040.00	96.18
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	58,512,207.00	56,114,350.00	95.90
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	55,500,000.00	53,596,350.00	96.57
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3,012,207.00	2,518,000.00	83.59
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	162,656,988.00	156,455,890.00	96.19
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	88,696,688.00	83,537,490.00	94.18
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	39,172,300.00	38,784,450.00	99.01
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1,665,000.00	1,450,000.00	87.09
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28,128,000.00	27,705,600.00	98.50
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4,995,000.00	4,978,350.00	99.67
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7,992,000.00	7,827,800.00	97.95
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1,332,000.00	1,190,000.00	89.34
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6,660,000.00	6,637,800.00	99.67
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8,880,000.00	8,769,000.00	98.75
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8,880,000.00	8,769,000.00	98.75
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8,880,000.00	8,769,000.00	98.75



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	110,042,580.00	93,545,250.00	85.01
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	90,728,700.00	79,864,500.00	88.03
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	90,728,700.00	79,864,500.00	88.03
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19,313,880.00	13,680,750.00	70.83
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13,732,800.00	8,180,700.00	59.57
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,581,080.00	5,500,050.00	98.55
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.330.159.000,00 atau 85,65 % dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disediakan sebesar Rp 3.888.253.107,00, seperti yang tertera di bawah ini:



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3,888,253,107.00	3,330,159,000.00	85.65

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 tidak memiliki anggaran belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan sehingga realisasinya 0.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp 4.995.000,00 atau 90,00% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp5.550.000,00.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5,550,000.00	4,995,000.00	90.00



5.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	Rp 7.286.578.682,51	Rp 3.662.024.992,51
Kewajiban	Rp 350.786.590,00	Rp 2.065.381.000,00
Ekuitas Dana	Rp 7.031.670.992,51	Rp 1.692.522.892,51

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
I. ASET	Rp 7.286.578.682,51	Rp 3.662.024.992,51

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.286.578.682,51 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 3.624.553.690 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 3.662.024.992,51.



Rincian aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	Rp 0	Rp 9.432.600,00
Aset Tetap	Rp 7.248.930.682,51	Rp 3.613.204.392,51
Aset Lainnya	Rp 37.648.000,00	Rp 39.388.000,00
Jumlah	Rp 7.286.578.682,51	Rp 3.662.024.992,51

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Aset Lancar	Rp 0	Rp 9.432.600,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0	Rp 9.432.600,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD. Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang



telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah. Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar 0,00.

2) Piutang Pajak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp0	Rp0

Piutang Pajak yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

3) Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 0,00	Rp 0,00

Persediaan yang tercatat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

b. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 7.248.930.682,51	Rp 3.613.204.392,51

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	1.753.500.000,00	1.753.500.000,00	0
2	Peralatan dan Mesin	6.277.285.976,00	5.976.713.686,00	300.572.290
3	Gedung dan Bangunan	3.954.549.200,00	624.390.200,00	3.330.159.000



No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	429.594.968,00	429.594.968,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	868.723.100,00	863.728.100,00	4.995.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	13.283.653.244	9.647.926.954	3.635.726.290

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut :

1)	Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp 1.753.500.000,00	Rp 1.753.500.000,00

Nilai aset tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.753.500.000,00 tidak bertambah ataupun tidak berkurang jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 1.753.500.000,00

2)	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 6.277.285.976,00	Rp 5.976.713.686,00

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.277.285.976,00 meningkat sebesar Rp 300.572.290 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 5.976.713.686,00.

3)	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 3.954.549.200,00	Rp 624.390.200,00

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.954.549.200,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 3.330.159.000,00 jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 624.390.200,00.

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025 Rp 429.594.968,00	31 Desember 2024 Rp 429.594.968,00
-----------	------------------------------------	---	---

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 429.594.968,00 tidak ada peningkatan jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 429.594.968,00.

5)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025 Rp 868.723.100,00	31 Desember 2024 Rp 863.728.100,00
-----------	---------------------------	---	---

Nilai aset tetap lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 868.723.100,00 dan mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 4.995.000 jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 863.728.100,00.

6)	Aset Lainnya	31 Desember 2025 Rp 37.648.000,00	31 Desember 2024 Rp 39.388.000,00
-----------	---------------------	--	--

Nilai aset lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar Rp 37.648.000,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang. Selain itu termasuk juga aset tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.



II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 350.786.590,00	Rp 2.065.381.000,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	350.786.590,00	2.065.381.000,00	1,714,594,410
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Utang Belanja	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	350.786.590,00	2.065.381.000,00	1,714,594,410



Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebesar Rp 350.786.590,00 yang meliputi:

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK
1	LS Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp40,036,590
2	LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Podcast dan Pembuatan Video) Sub Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Rp176,500,000
3	LS Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Peringatan Hari Ibu Tahun 2025) Tanggal 17 Desember 2025 Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp21,250,000
4	LS Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub.Keg Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp13,000,000
5	LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sub.Keg Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp100,000,000
JUMLAH		Rp350,786,590

III.	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	DANA	Rp 7.031.670.992,51	Rp 1.692.522.892,51

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Ekuitas Dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 7.031.670.992,51.



5.3 Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Tidak ada target anggaran dan realisasi pendapatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025.

2. Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp 20.341.187.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
BEBAN	20.341.187.679,00	24.488.637.676,07
Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi	20.341.187.679,00	24.488.637.676,07
Beban Pegawai	9.394.909.840,00	9.256.442.477,00
Beban Barang dan Jasa	10.946.277.839,00	14.725.362.328,02
Beban Hibah	0,00	200.000.000,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	306.832.871,05

2.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban



Pegawai sebesar Rp 9.394.909.840,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Nilai
8.1.01	Beban Pegawai	9.394.909.840,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.956.864.454,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.919.100.000,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.091.065.300,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	828.034.700,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	231.166.002,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	164.690.558,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	66.475.444,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	138.530.000,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	138.530.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	146.923.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	146.923.000,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.190.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.590.000,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	53.600.000,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	157.441.080,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	103.126.080,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	54.315.000,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.301.501,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.301.501,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	52.322,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	32.666,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.656,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	233.876.054,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	195.931.603,00
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	37.944.451,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.321.181,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.333.805,00
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.987.376,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	18.963.314,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	13.001.440,00
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.961.874,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.438.045.386,00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.508.367.523,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.508.367.523,00



Kode Rekening	Uraian	Nilai
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	500.075.730,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	500.075.730,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.429.602.133,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.429.602.133,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00

b. Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 10.946.277.839,00 dengan rincian sebagai berikut

Kode Rekening	Uraian	Nilai
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	10.946.277.839,00
8.1.02.01	Beban Barang	2.993.386.988,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	2.993.386.988,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	173.280.000,00
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	94.195.044,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.209.746,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.184.212,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	286.010.297,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.490.000,00
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	9.950.372,00



8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.411.375,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.579.924,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.550.795,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.382.280,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	244.835.570,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	169.521.220,00
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	2.374.850,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.436.430,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	533.182.925,00
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	178.685.025,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	254.122.517,00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.573.106,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	419.067.400,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.735.000,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	56.828.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	188.582.000,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.349.600,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.985.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	18.131.850,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	98.732.450,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00
8.1.02.01.04.0409	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00
8.1.02.02	Beban Jasa	4.532.869.951,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.860.966.592,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	269.200.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52.500.000,00
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	144.000.000,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0,00



8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.992.500,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	828.759.412,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	66.200.000,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	247.182.800,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	35.991.185,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	499.921.800,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.059.530.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	2.685.500,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.700.595,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	179.168.388,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.664.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.491.540,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.156.372,00
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	7.426.000,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	400.036.500,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41.786.483,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.816.284,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.208.975,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.761.224,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	220.203.300,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	181.724.300,00
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
8.1.02.02.04.0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	38.479.000,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	108.257.782,00
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.950.000,00
8.1.02.02.05.0036	Beban Sewa Taman	6.064.600,00
8.1.02.02.05.0037	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	2.243.182,00
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	240.155.794,00



8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	49.922.694,00
8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	190.233.100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	61.500.000,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	61.500.000,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	135.009.220,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.351.160,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.926.674,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.481.810,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.942.676,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.658.060,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	59.658.060,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.281.611.680,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.281.611.680,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.274.201.381,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.410.299,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.003.400.000,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.003.400.000,00
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.003.400.000,00

c. Beban Hibah

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mencatat tidak ada realisasi Beban Hibah.

Uraian	Nilai
-	-



d. Beban Bantuan Sosial

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mencatat tidak ada realisasi Beban Bantuan Sosial.

Uraian	Nilai
-	-

e. Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mencatat tidak ada realisasi Beban Penyisihan Piutang.

Uraian	Nilai
-	-

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp 0.

Uraian	Nilai
-	-



5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Ekuitas Dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 7.031.670.992,51.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI
NON KEUANGAN

The logo of the Province of Riau is a large, faint watermark in the background. It features a shield with a central torch, a yellow rice stalk on the left, and a pink flower on the right. The shield is surrounded by a yellow border. Below the shield is a yellow banner.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124, Pos-el: dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman: <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan kewenangan daerah yang dibentuk untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib. Sebagai pelaksana teknis operasional, yang seringkali mencakup pengolahan data, penyajian data, serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Sifat layanannya berfokus pada pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan khusus anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan



fungsi: Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur serta Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mengalami pergantian kepala dinas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 630 Tahun 2025, sebelumnya Dr. H.T.S Arif Fadillah, S.Sos, M.Si menjadi Burhanuddin, S.Hut,MH. Dan mengalami pergantian Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2025 yaitu an. Silveriani Dian Safitri S, A.Md.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 630 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 627 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Nomor B/483/BKDKORPRI/SP/2025, maka perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1038);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Mei 2025

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU,



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
13. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
15. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
17. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/JABATAN			
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos., M.Si. NIP : 196703061997031004 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : IKA HASILLAH, M.Si. NIP : 197101032006042022 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/(IV/b) Jabatan : Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		
2.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : MISNI, S.K.M., M.Si. NIP : 197305161999032007 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si. NIP : 197904222003121009 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/c) Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		
3.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. DIKY WIJAYA, M.Si. NIP : 197308112003111002 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : ABDULLAH, S.Sos, M.H. NIP : 1970121019931004 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau		
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. DARSON, S.Pd., M.Si. NIP : 196907091992031011 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si. NIP : 196905101994011004 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau		
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si. NIP : 197904222003121009 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : NOVIANTO, S.E., M.Si. NIP : 196311101990091003 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau		

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/JABATAN			
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
6.	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	BURHANUDDIN, S.Hut., M.H. 197103201998031005 Pembina Utama Muda/(IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	Dr. MAHADI RAHMAN, SQ., M.Pd.I 197201122001121005 Pembina Utama Muda/(IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si. 196602161986021003 Pembina Utama/(IV/e) Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	BURHANUDDIN, S.Hut., M.H. 197103201998031005 Pembina Utama Muda/(IV/c) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	JHON ANDARIASTA BARUS, S.E., M.Ak. 197609092006041010 Pembina/(IV/a) Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	Dr. DIKY WIJAYA, M.Si. 197308212003121002 Pembina Utama Muda/(IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
9.	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	GUNTUR SAKTI, S.Sos., M.Si. 196912081990091001 Pembina Utama Madya/(IV/d) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	HASAN, S.Sos. 197711102006041010 Pembina Utama Muda/(IV/c) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	HASAN, S.Sos. 197711102006041010 Pembina Utama Muda/(IV/c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	HENDRI KURNIADI, S.STP., M.Si. 197711161996121001 Pembina Utama Madya/(IV/d) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	Drs. MUHAMMAD IKSAN, M.Si. 196905101994011004 Pembina Utama Madya/(IV/d) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	Dr. DARSON, S.Pd., M.Si. 196907091992031011 Pembina Utama Muda/(IV/c) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/JABATAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nama : HENDRI KURNIADI, S.STP., M.Si. NIP : 197711161995121001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nama : MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos., M.Si. NIP : 196703061997031004 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,





GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5/6/1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Manday Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55).
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58).
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10).
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan

Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 300).

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 394.
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Uang Daerah dan Manajemen Kas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 300).
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Nomenklatur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 409).
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. Bendahara Pengeluaran Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.
 3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.
 4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak (Bank atau ditetapkannya Kepala Daerah)
 9. Memeriksa kas secara periodik.
 10. Menerima dokumen DUKU transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dan bank.
 11. Menerima dan memverifikasi atas pengembalian belanja atas rekening atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
 12. Menyuplai dokumen surat tanda seruan atas pengembalian belanja akibat korupsi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
 13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran peninjauan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi Berifat Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Hutan, Teluk Kina, Tanjungpinang
Kecamatan Teluk Kina, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau 20139
Pusat Operasi dan Data Utama - Tanjungpinang Kota, Riau 20129
Email: SKAD@kepri.go.id atau SKAD@kepri.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA UNIT ORGANISASI BERSEKUT KHASUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU :

MENIMBANG
MENGINGAT

dit
dit

MENETAPKAN
KESATU

MEMUTUSKAN

Bendahara Pengeluaran
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Unit Kerja

SILVERIAN DIAN SAFITRI S. A. Ms
197707242010012006
Petata Muda Tk. I (III/b)
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau

Terbentuk mulai tanggal 2 Januari 2025 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dan diberikan Honorarium yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 2 Januari 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH.

VENTI MEDARIA DEVIWATI, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 196805281998032004

PERHATIAN

1. Agar membaca secara cermat materi SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2025 mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersekat Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta melaksanakannya secara tertib.
2. Wajib melakukan pencatatan/pembukuan terhadap setiap transaksi keuangan secara tertib dan teratur.
3. Dilarang menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi/memipkan kepada orang lain di luar yang telah ditentukan dalam program/kegiatan.

BAB VII

PENUTUP

The logo of the Province of Riau is a large, faint watermark in the background. It features a shield with a yellow border. Inside the shield, there is a yellow five-pointed star at the top, a white sailboat in the center, and a yellow crescent moon at the bottom. The shield is flanked by a yellow rice stalk on the left and a yellow cotton plant on the right. Below the shield is a yellow banner with the text "BERKUALITAS BERKEMAJUAN" in black capital letters.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB VIII P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 25,691,508,379.00 atau 93,47% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp 27.485.967.298,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.286.578.682,51
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 350.786.590,00.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.031.670.992,51.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

**L
A
M
P
I
R
A
N**





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Pinang
 Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Rasyid Syah Gedung Raja Ali (Mahmud Pasisi Bayan)
 Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kota Pinang 29124
 E-mail : bkad@kepriprov.go.id Laman : <http://bkad.kepriprov.go.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / Tanggal : Senin 08 Januari 2025

Tempat : Aula MKN Asrama HRI

Tujuan Dilakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU** dengan **DINAS PEMBENDAYAAN PERSEKUTUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENGUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU** dengan hasil sebagai berikut:

A. DATA LRA

NO.	URAIAN	REGISTER SP2D	KH OPD / BUD	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Register SP2D LP	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2	Register SP2D TV	4.985.412.126,00	4.985.412.126,00	0,00	
3	Register SP2D LS	17.389.100.561,00	8.557.284.442,00	8.831.816.119,00	Prak Kerja = 6.920.597.615,00 Pelangan SP2D = 1.911.218.504,00
4	Register SP2D OU	2.466.758.524,00	2.466.758.524,00	0,00	

B. DATA TSP

NO	URAIAN	BRUTO	POTONGAN	NETTO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Register TSP LP/OU/TV	8.283.219.767,00	323.887.411,00	7.959.332.356,00	

C. REALISASI BELAJAR

No.	URAIAN	PAGU	REKAP SP2D LP/OU/TV/LS	BELANJA TSP (LP/OU/TV) + LS	KOREKSI BELANJA	BELANJA SETELAH KOREKSI	SALDO KAS	STS LP/TV	KAS YANG LEBIH DIBAYAR / (KURANG DIBAYAR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gesera	21.485.967.298,00	25.353.368.215,00	25.895.300.343,00	571.933,00	25.891.368.379,00	246.887.873,00	246.887.873,00	-
	JUMLAH	21.485.967.298,00	25.353.368.215,00	25.895.300.343,00	571.933,00	25.891.368.379,00	246.887.873,00	246.887.873,00	-

D. DATA SALDO KAS REKENING KORAS

NO	NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AWAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Saldo Rekening Koran Bank Permisi 1 Januari 2025	Bank Riau Pasisi Bayan	DINAS PP PA/PP DAN KB HKCU KEMRI	103.01.0000	0,00

E. SETORAN KE KASDA - STS

No.	NOMOR STS	NOMOR SP2D	TANGGAL DEBITOR (sesuai dengan tanggal SP2D)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
1	21.0007.0000001TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000000TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	05 Juni 2025	-	STS TU 1 Kog. Pengerahan Pelaksanaan Desain Program Penguatan Keluarga Melalui Peningkatan Kolaborasi dan Kelembagaan Keluarga. Sub Kog. Penguatan Keluarga dan Kelembagaan Keluarga (DAR 9000)
2	21.0007.0000002TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000002TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	19 Juni 2025	12.211.800,00	STS TU 1 DAK. Kog. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kog. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMK Kawerangan Provinsi
3	21.0007.0000003TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000003TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	18 Juli 2024	1.140.230,00	STS TU 1 DAK Kog. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan
4	21.0007.0000004TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000004TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	26 Juli 2024	1.657.500,00	STS TU 1 DAK Kog. Penguatan dan Penguatan Layanan Penyedia Layanan Penguatan Perempuan Kawerangan Provinsi, Sub Kog. Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Penguatan bagi Gender TV, 1 Fask. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan
5	21.0007.0000005TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000005TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	20 August 2025	594.000,00	STS TU 2 DAK. Kog. Penguatan Kelembagaan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Kelembagaan, Program dan
6	21.0007.0000006TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000006TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	12 September 2025	30.425,00	STS TU 2 DAK Kog. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan
7	21.0007.0000007TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000007TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	22 September 2025	2.491.200,00	STS TU 2 DAK Kog. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan
8	21.0007.0000008TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000008TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	30 September 2025	4.178.700,00	STS TU 1 DAK Kog. Penguatan Pelaksanaan Desain Program Penguatan Keluarga Melalui Peningkatan Kolaborasi dan Kelembagaan Keluarga, Sub Kog. Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan Keluarga
9	21.0007.0000009TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000009TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	11 November 2025	800,00	STS TU 2 DAK Kog. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan
10	21.0007.0000010TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000010TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	18 November 2025	13.594.000,00	STS TU 1 DAK Kog. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan
11	21.0007.0000011TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000011TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	20 November 2025	-	STS TU 3 DAK Kog. Penguatan Pelaksanaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kog. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMK Kawerangan Provinsi
12	21.0007.0000012TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000012TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	24 November 2025	1.000.000,00	STS TU 2 DAK Kog. Penguatan Kelembagaan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kog. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Kelembagaan terhadap Anak
13	21.0007.0000013TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000013TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	17 Desember 2025	13.612.440,00	STS TU 2 DAK Kog. Penguatan Pelaksanaan
14	21.0007.0000014TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000014TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	29 Desember 2025	3.606.500,00	STS TU DAK Kog. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMK Kawerangan Provinsi
15	21.0007.0000015TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000015TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	29 Desember 2025	10.227.300,00	STS TU Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kawerangan Provinsi
16	21.0007.0000016TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000016TUJ.08.2.14.0.00.08.0000P490205	31 Desember 2025	-	STS TU Penguatan dan Penguatan Ajaib Kemitraan dalam Program Berbagi Rasa
17	21.0008.0000000P490205.08.2.14.0.00.08.0000P490205		31 Desember 2025	175.000.140,00	STS LP Kog. PENGADAAN PRODUK KOPRO TAHUN 2025
Jumlah				340.987.875,00	

F. SETORAN KE KASDA - PENGEMBALIAN BELANJA

No.	NOMOR DOKUMEN	NOMOR SP2D / TRF	TANGGAL DEBITOR (sesuai dengan tanggal SP2D)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
1	21.0007.0000001A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000001A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	18/07/2025	323.572,00	Pengembalian Kelembagaan Berbagi Cita. RPPK Bulan Juli 2025
2	21.0007.0000002A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000002A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	18/07/2025	323.572,00	Pengembalian Kelembagaan Berbagi Cita. RPPK Bulan Juli 2025
3	21.0007.0000003A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000003A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	08/08/2025	30.825,00	Pengembalian Biaya Pemeliharaan Komputer Sub Kegiatan Pemeliharaan Mesin Lainnya 02 VI
4	21.0007.0000004A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000004A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	08/08/2025	6.700,00	Pengembalian Biaya Senda Pita (Mikro)
5	21.0007.0000005A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	21.0004.0000005A.02.08.2.14.0.00.08.0000P490205	17/11/2025	179.030,00	Pengembalian Biaya Pemeliharaan Dmes Rona
Jumlah				873.699,00	

G. REKAPITULASI PENGEMBALIAN KE KASDA ATAS TERBUKAI SP/INSPEKTORI/REKON

No.	JENIS TERBUKAI	URAIAN	TANGGAL TERBUKAI	TANGGAL DIBETOR (dalam bentuk revisi/keputusan)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
1	SPK	Realisasi pembayaran Uang Hutan Rp 25 - 27 Rsd dan 15- 16 Dsd 2024	2024	2025/05/25	740.000,00	
Jumlah					740.000,00	

H. KESIMPULAN

No.	NILAI (Rp)			NILAI (Rp)			NILAI (Rp)			KETERANGAN
	NABE REKONSILIASI SP/LK + TBP (UPDUTU) Bulan (n)	LRA Realisasi Belanja Daerah	SELISIH	NABE REKONSILIASI Jumlah SP/LK Belanja	LRA ADMINISTRATIF Jumlah SP/LK + UPDUTU	SELISIH	NABE REKONSILIASI Saldo Kas Bendahara	SP/LK Saldo	SELISIH	
1	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-	-	-	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bendahara Pengeluaran



SACAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi

GATULI PRASETIYO
NIP. 19910226 202521 1 011

Mengetahui,
SACAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Dr. YUDI MARYADI, S.E., M.A.P.
NIP. 19810328 200904 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : https://bkad.kepriprov.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI PELUNASAN UTANG
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari / Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026

Tempat : Aula Airlana Haji Kota Tanjungpinang

Telah dilakukan Rekonsiliasi Pelunasan Utang antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No.	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	NILAI PELUNASAN UTANG UTANG (Rp)	SISA UTANG (Rp)	KETERANGAN
		3	4	5=3-4	
1	Utang Belanja Pegawai	-	-	-	
2	Utang Belanja Barang Jasa	2.043.241.000,00	2.043.241.000,00	-	
3	Utang Belanja Hibah	-	-	-	
4	Utang Belanja Modal	22.140.000,00	22.140.000,00	-	
5	Utang Jangka Pendek lainnya	-	-	-	
	Jumlah	2.065.381.000,00	2.065.381.000,00	-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan untuk dapat diperbaiki.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bendahara Pengeluaran,

SILVERIANI DAN SAFITRI S.A.Mg
NIP. 197707242010013008



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekon,

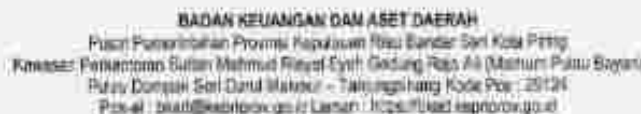
CATUR PRASETIYO

NIP. PPPK 19910225 202521 1 011

MENGETAHUI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Atas Keinginan Pusat dan Daerah Atas Muka

Dr. YUDI MARYADI, S.E., M.A.P.
NIP. 19810328 200904 1 001





Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> by guest on February 10, 2015

WFO	WFO Description	WFO Code	WFO Name	WFO Type	WFO Status	WFO Location	WFO Contact	WFO Email	WFO Phone
1	WFO 1	1	WFO 1	1	1	1	1	1	1
2	WFO 2	2	WFO 2	2	2	2	2	2	2
3	WFO 3	3	WFO 3	3	3	3	3	3	3
4	WFO 4	4	WFO 4	4	4	4	4	4	4
5	WFO 5	5	WFO 5	5	5	5	5	5	5
6	WFO 6	6	WFO 6	6	6	6	6	6	6
7	WFO 7	7	WFO 7	7	7	7	7	7	7
8	WFO 8	8	WFO 8	8	8	8	8	8	8
9	WFO 9	9	WFO 9	9	9	9	9	9	9
10	WFO 10	10	WFO 10	10	10	10	10	10	10

DAFTAR BERKAS TUNDA BAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA INSTANSI : DINAS PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

NO	NO.SPM	NAMA PIHAK KE TIGA	NAMA KEGIATAN	NILAI
1	21.0003.000004.5/2.08.2.14.0.00.00.0 000PPR03120036	EMWAT BIKTANG AZ ZF	LS PEMBELANJAAN ALAT BAHAN UNTUK KED KANTOR BAHAN CETAK SUBSIS PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HEDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	Rp 40.000.000
2	21.0003.000004.5/2.08.2.14.0.00.00.0 000PPR03120036	TRISUR MEDIA GRAFICA PT	LS PEMBELANJAAN BELANJA JASA, IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAJ SUBSIS PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI PEMENULAN HAK ANAK	Rp 175.500.000
3	000211-000200	CV NATAMA JAYA	LS BELANJA MAKAN MINUM	Rp 21.000.000
4	00000188.5/2.08.2.14.0.00.00.000PPR03	EKA PATRA NUSA CV	LS PEMBELANJAAN BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KED KANTOR BAHAN CETAK PD SUBSIS ADVOKASI KEBUNGAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	Rp 12.000.000
5	00000188.5/2.08.2.14.0.00.00.000PPR03	MEDIANESIA MAJU NUSRACHO PT	LS PEMBELANJAAN BELANJA JASA, IKLAN/REKLAME, FILM PD SUBSIS ADVOKASI KEBUNGAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	Rp 100.000.000
TOTAL				Rp 350.700.000

PENERIMA		TANDA TANGAN
NAMA	SILVERIANI DIAN SAFITRI S. A.M	
NP	197707242010012006	
HARI	SENIN	
TANGGAL	5 JANUARI 2025	





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sultan Mansyur Syah Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dp3ep2kbkepri@gmail.com Laman : <http://bpppa.kepriprov.go.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900.1.6.3/14/BA-REKON BMD – TAHUNAN/II/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh belas bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025) telah dilaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap Tahunan antara Pengurus Barang Pengguna dan Bendahara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	: Silveriani Dian Safitri, S, Amd
NIP	: 19770724 201001 2 006
Pangkat / Gol	: Penata Muda Tk.I / III.b
Jabatan	: Bendahara

Dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

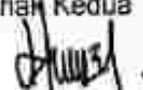
2. Nama	: Resty Lidyaningsih, AMK
NIP	: 19890112 201101 2 004
Pangkat / Gol	: Penata Muda Tk.I / III.b
Jabatan	: Pengolah Data dan Informasi

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per 31 Desember 2025. Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

Pihak Kedua


Resty Lidyaningsih, AMK
NIP 19890112 201101 2 004

Pihak Kesatu


Silveriani Dian Safitri, S,Amd
NIP 19770724 2010012006

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau


Burhanuddin, S.Hut., M.H.
NIP 197103201998031008

Lampiran :
 Nomor : 900.1.6.3/14 / BA-REKON BMD – TAHUNAN II/2026
 Tanggal : 05 Januari 2026

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No.	Uraian	Saldo Awal per 01 Januari 2025		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp.)	Neraca SKPD (Rp.)	
1	2	3	4	5=3-4
A	ASET LANCAR	-	-	-
	Persediaan			
B	ASET TETAP	9.647.926.954,00	9.647.926.954,00	-
	1 Tanah	1.753.500.000,00	1.753.500.000,00	-
	2 Peralatan dan Mesin	5.976.713.686,00	5.976.713.686,00	-
	3 Gedung dan Bangunan	624.390.200,00	624.390.200,00	-
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	429.594.968,00	429.594.968,00	-
	5 Aset Tetap Lainnya	863.728.100,00	863.728.100,00	-
	6 Konstruksi dalam Bangunan	-	-	-
	7 Akumulasi Penyusutan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	27.900.000,00	27.900.000,00	-
	1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	2 Aset tidak berwujud	27.900.000,00	27.900.000,00	-
	3 Aset lain-lain	-	-	-
	4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-

2. Saldo Akhir

No.	Uraian *	Saldo Awal per 31 Desember 2025		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp.)	Neraca SKPD (Rp.)	
1	2	3	4	5=3-4
A	ASET LANCAR	-	-	-
	Persediaan			
B	ASET TETAP	13.118.193.318,00	13.118.193.318,00	-
	1 Tanah	1.753.500.000,00	1.753.500.000,00	-
	2 Peralatan dan Mesin	5.941.305.256,00	5.941.305.256,00	-
	3 Gedung dan Bangunan	4.144.704.994,00	4.144.704.994,00	-
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	429.594.968,00	429.594.968,00	-
	5 Aset Tetap Lainnya	849.088.100,00	849.088.100,00	-
	6 Konstruksi dalam Bangunan	-	-	-
	7 Akumulasi Penyusutan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	27.900.000,00	27.900.000,00	-
	1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	2 Aset tidak berwujud	27.900.000,00	27.900.000,00	-
	3 Aset lain-lain	-	-	-
	4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-

Pihak Kedua


Resty Lidyaniingsih, AMK
NIP. 19890112 201101 2 004

Pihak Kesatu


Silveriani Dian Salitri, S.Amd
NIP. 19770724 2010012006

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau


Burhanuddin, S.Hut., M.H.
NIP. 197103201998031008



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Gedung 10A, Jalan Pahlawan
 Kawasan Pertahanan Jalan Mayjend Rasyid Riyah, Gedung 10A, 20124
 Pulau Bintan, Kepulauan Riau
 Email: skad@kepri.go.id Website: www.kepri.go.id
 BERITA ACARA KEBERHASILAN ASSET TETAP

BOMOR : 1

Pada hari ini, bertempat di Gedung 10A, Jalan Pahlawan Kawasan Pertahanan Jalan Mayjend Rasyid Riyah, Gedung 10A, 20124, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Keberhasilan Asset Tetap Tahun 2022 antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas/Instansi/Perusahaan/Perorangan/Perwakilan dari Kelompok Bawahan, dengan hasil sebagai berikut :

NOLO KELOMPOK	URAIAN	SAUDU AWAL Per 31 Desember 2021	LAPORAN REALISASI ANALISIS 1 Januari 2022	MUTASI TAMBAH 1 Januari 2022	MUTASI KURANG 1 Januari 2022	JUMLAH PENYERAHAN ASSET 1 Januari 2022	SAUDU AKHIR Per 31 Desember 2022	RETRAKSI
1.1	ASSET TETAP	9.447.824.914,00	9.447.824.290,00	240.133.794,00	427.273.720,00	9.479.264.364,00	13.138.199.114,00	
1.1.1	TANPA	1.753.500.000,00				-	1.753.500.000,00	
1.1.2	PERALATAN DAN MESIN	5.975.713.888,00	5.975.713.290,00		558.120.720,00	6.533.834.008,00	8.541.305.228,00	Mutasi Tambahan : - Akumulasi depresiasi sebesar Rp.7.877.340,- - Saldo ke Aset Lainnya karena sudah diserahkan Rp.200.840.340,-
1.1.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	624.390.200,00	5.310.108.000,00	240.133.794,00	50.000.000,00	5.500.311.794,00	4.344.704.994,00	Mutasi Tambahan : - BELANJA JASA KONSULTASI PENYERAHAN ARSITEKTUR (100%) JASA KONSULTASI PENYERAHAN RENOVASI KANTOR DPRD PIR Rp.100.000.000,00 - JASA KONSULTASI PERENCANAAN (JAS PER) Rp.40.000.000,00 Mutasi Kurang : - Saldo dari Saldo Mutasi Kurang - Penyerahan 5 MP karena diserahkan Rp.40.000.000,-
1.1.4	ALAS, WILAYAH DAN SARUNGAN	429.094.968,00				-	429.094.968,00	
1.1.5	ASSET TETAP LAINNYA	863.728.100,00	8.905.000,00		15.835.000,00	16.640.000,00	940.108.100,00	Mutasi Tambahan : - Saldo ke Aset Lainnya karena sudah diserahkan Rp.15.835.000,-
1.1.6	KONSTRUKSI DALAM PENGURUSAN					-	-	
1.2	ASSET LAINNYA	27.880.000,00	-	420.078.360,00	420.078.360,00	-	27.880.000,00	
1.2.2	KEMUTUHAN DENGAN PHAS KETUA					-	-	
1.2.3	ASSET TIDAK BERHASIL	27.000.000,00				-	27.000.000,00	
1.2.4	ASSET LAINNYA			420.078.360,00	420.078.360,00	-	-	Mutasi Tambahan : - Saldo dari SK B Rp.100.000.000,- - Saldo dari SK C Rp.30.000.000,- - Saldo dari SK D Rp.20.000.000,- Mutasi Kurang : - Penyerahan 5 MP karena diserahkan Rp.40.000.000,-
1.3	ASSET KONTRAKSI/RENTAL	3.815.814.712,00	-	7.877.340,00	34.715.000,00	46.407.840,00	100.494.272,00	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	348.594.112,00		7.877.340,00	34.715.000,00	46.407.840,00	201.494.272,00	Mutasi Tambahan : - Saldo dari penyajian mesin sebesar Rp.7.877.340,-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN					-	-	
1.3.4	ALAS, WILAYAH DAN SARUNGAN					-	-	

Dengan Berita Acara Keberhasilan Asset Tetap ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN KELOMPOK BAWAHAN

NIKETI LUBIS, S.P., M.A.P.
 NIP.1965122019102004

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOVA MULYA YANTO, S.E., M.A.P.
 NIP.1963122019102004

LAPORAN TAHUNAN (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2025
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

[illegible]

Mengetahui :
KEPALA DINAS PEMBUDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN KEMISKINAN DAN KB PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BURHANUDDIN, S. HIL, M. H
Pembina Utama Muda
No. 10710020 19803 1 008

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
 PENGURUS BARANG PENGELOLA
 DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA

RESTY LIYANINGSIH, AMK
Penata Muda Tk. I
NIP.19690112 201101 2 004

**LAPORAN TAHUNAN (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2025
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

PROVINSI
SATUAN KERJA

: KEPULAUAN RUMU
: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	FOTO GAMBAR	NAMA BARANG	MERK TYPE	NOMOR			JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA Rp.	KETERANGAN (nama Kegiatan)	NO SP2D	NO KONTRAK/NO SP	NAMA PIHAK KETIGA	NO BASTIP	KET	PEMAKAI BARANG
				KAMKAS	BESIN	POLISI											
1		Printer	Epson L3011 EcoTank				2	Unit	4.000.350	8.190.700	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan dan Pengembangan Kantor	21.00/04.00 001174.5/2.0 8.2.14.0.00.0 8.0000.PP/11 1/2025	EP- 01JST62T60A039 NETESAHMINTA Tanjung 24 April 2025	CV. UNISINDO	030/183.02.08.01.1.00 0002/BASTIP/OPSAP2 KB/2025, Tanggal 29 April 2025	Sah	
2		Motor	Epson L5290				1	Unit	5.500.000	5.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelayanan Layanan AMPK Kementerian Provinsi	21.00/04.00 001174.5/2.0 8.2.14.0.00.08 8.0000.PP/11 1/2025	EP- 01K082VY00R02 841H0V0C111F06 Tanggal 25 Agustus 2025	CV. UNISINDO	030/183.02.08.01.1.0 2.0007/BASTIP/OPSAP 2KB/2025, Tanggal 14 Oktober 2025	Sah	UPTD
3		Lemari Es (Kulkas 1 Pintu)	SHARP 1 PINTU ES X10TW-DR				1	Unit	3.200.900	3.200.900	Sub Kegiatan Koordinasi Pelayanan Layanan AMPK Kementerian Provinsi	21.00/04.00 001174.5/2.0 8.2.14.0.00.08 8.0000.PP/11 1/2025	EP- 01K082VY00R02 841H0V0C111F06 Tanggal 25 Agustus 2025	CV. UNISINDO	030/183.02.08.01.1.0 2.0007/BASTIP/OPSAP 2KB/2025, Tanggal 14 Oktober 2025	Sah	UPTD
4		Kursi Kantor	Kursi Rotasi Hidra Sandaran Punggung				2	Buah	740.000	1.480.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelayanan Layanan AMPK Kementerian Provinsi	21.00/04.00 001174.5/2.0 8.2.14.0.00.08 8.0000.PP/11 1/2025	EP- 01K082VY00R02 841H0V0C111F06 Tanggal 21 Agustus 2025	CV. DEWASIA DEBSA	030/183.02.08.01.1.0 0002/BASTIP/OPSAP2 KB/2025, Tanggal 14 Oktober 2025	Sah	UPTD
5		Dapur Blender Jumbo	Olivetti (MAD 7001)				1	Unit	1.400.000	1.400.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelayanan Layanan AMPK Kementerian Provinsi	21.00/04.00 001174.5/2.0 8.2.14.0.00.08 8.0000.PP/11 1/2025	EP- 01K082VY00R02 841H0V0C111F06 Tanggal 25 Agustus 2025	CV. UNISINDO	030/183.02.08.01.1.0 0002/BASTIP/OPSAP2 KB/2025, Tanggal 14 Oktober 2025	Sah	UPTD
6		Kamera	CANON EOS 750D KIT 18- 55MM				1	Unit	8.700.000	8.700.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelayanan Layanan AMPK Kementerian Provinsi	21.00/04.00 001174.5/2.0 8.2.14.0.00.08 8.0000.PP/11 1/2025	EP- 01K082VY00R02 841H0V0C111F06 Tanggal 26 Agustus 2025	CV. UNISINDO	030/183.02.08.01.1.0 2.0007/BASTIP/OPSAP 2KB/2025, Tanggal 14 Oktober 2025	Sah	UPTD

No	FOTO GAMBAR	NAMA BARANG	MEREK TYPE	NOMOR			JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA Rp.	KETERANGAN (Kegiatan)	Nama	NO SP2D	NO KONTROL SP	NAMA PIHAK KETIGA	NO BASTIP	KET	PENAKIP BARANG
				PARKIR	REKAM	POLISI												
7		Filing Cabinet	Filing Cabinet				3	Unit	4.925.400	14.785.200	Su. Kegiatan Koordinasi Perkembangan Layanan AMPL Kewaspadaan Provinsi		21.0054.010 001201.512.0 8.2.14.0.10.0 APR/15/2025	EP- 1100608ANY30 G2205P/0147C WCI, Tanggal 21 Agustus 2025	CV. DESMANA DESA	0037153.a/S 08.07.1.0 2.0007BAST/DP234 P2R02025	Bak	UPTD
8		LAPTOP	ADVAN RIO ONE PC				1	Unit	9.824.500	9.824.500	Su. Kegiatan Koordinasi Perkembangan Layanan AMPL Kewaspadaan Provinsi		21.0054.010 001201.512.0 8.2.14.0.10.0 5.0000/PW/1 10025	EP- 0103A22QY088 PTORMMY22118 0R, Tanggal 28 Agustus 2025	CV. UNISINDO	0037153.a/S 08.07.1.0 2.0007BAST/DP234 P2R02025, Tanggal 14 Oktober 2025	Bak	UPTD
9		PC KOMPUTER	ADVAN RIO ONE PC				2	Unit	8.824.800	17.648.000								
10		MEJA RESEPSIONIS	MEJA RESEPSIONIS				1	Unit	9.328.400	9.328.400								
11		LOKER 8 PINTU	LOKER 8 PINTU				4	Unit	902.340	3.609.360								

No	FOTO GAMBAR	NAMA BARANG	MERK TYPE	NOMOR			Jumlah	Satuan	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA Rp.	KETERANGAN (nama Kegiatan)	NO SP2D	NO KONTRAKING SP	NAMA PIHAK KETIGA	NO BASTIP	KET	PEMANGKU BARANG
				BARANG	NSN	POLISI											
12		Lemari Besi	Lemari Besi				2	Unit	3.525.400	7.050.800	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan RANP Kecamatan Prabon	21.09/94.5/001124.5/2.5.2.14.0.00.0.0.000/PR/110025	SP-01K2G2YBC452R FAP/2025/03/04 WY, Tanggal 31 Agustus 2025	CV. DESIMANA DEIMA	002183742.00.07.1.0.0.000/BAKTI/OP3AP/2025/2025, Tanggal 14 Oktober 2025	Suk	UPTD
13		Meja 1/2 Besi	Meja 1/2 Besi				1	Unit	2.474.790	2.474.790							
14		Kursi Tunggu	Kursi Tunggu				1	Unit	2.965.140	2.965.140							
15		Sofa Kantor	Sofa Kantor				1	Unit	7.885.900	7.885.900							
16		PC KOMPUTER	PC ASUSO KRYE FLEX 51				1	Unit	10.767.000	10.767.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.09/94.5/001124.5/2.5.2.14.0.00.0.0.000/PR/110025	SP-01K2G2YBC48K ETH322-PM095 KG, Tanggal 25 September 2025	CV. VIKSINCO	00218112.00.01.1.00.0000/BAKTI/OP3AP/2 KB/2025, Tanggal 10 Oktober 2025	Suk	PRK
17		TV	SMART TV 40 INCH				1	Unit	4.395.600	4.395.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Pemohonan Kajian Kesehatan Kecamatan Prabon	21.09/94.5/001894.5/2.5.2.14.0.00.0.0.000/PR/110025, 11 November 2025	SP-01K2G2YBC452R 03K2YPRFR75 A, Tanggal 28 Agustus 2025	CV. CAHAYA PRATAMA	0021843/2.00.03.1.0.0.000/BAKTI/OP3AP/2025/2025, Tanggal 15 Oktober 2025	Suk	UPTD

No	FOTO SAMBAN	NAMA BARANG	MERK TYPE	NOBOKR			JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA Rp.	KETERANGAN (Nama Kegiatan)	NO SP2D	NO KONTRAK NO. SP	NAMA PIHAK KETIGA	NO BASTIP	KET	PEMILAH BARANG
				RANGKAI	RESEMI	POLISI											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14			
18		Lampiran Anap	Lampiran Buku				1	Lks	5.937.500	5.937.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penjabaran Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan	21.0000.010 001721.512.0 5.2.14.0.00.0 5.0000.PP/1 1/2025, 11 November 2025	EP - DITKJAP/8104/P 000000010231 0 Tanggal 27 Agustus 2025	CV. CAHAYA PRATAMA	00011844/0.08.23.1.0 1.0003/BAST/DP/SAP 2025/2025, Tanggal 15 Oktober 2025	Buk	UPTD
19		APAR (Pemadam Api) Butuh 3 Kg	DRY POWDER/ 3 KG				3	Liter	1.508.450	4.525.350	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penjabaran Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan	21.0000.010 001685.012.0 5.2.14.0.00.0 5.0000.PP/1 1/2025, 11 November 2025	EP - DITKJAP/8104/P 000000010231 0P, Tanggal 25 Agustus 2025	CV. CAHAYA PRATAMA	0001 1842.08.03.1.02.000 355A57/ DP/8104/02/025, Tanggal 15 Oktober 2025	Buk	UPTD
20		TV	TV LED 15 INCH LG UHD				1	Unit	22.210.000	22.210.000	Sub Kegiatan Persiapan Pemasangan Rumah Tangga Provinsi TA.2025	21.0004.010 001261.512.0 5.2.14.0.00.0 5.0000.PP/1 1/2025	EP - DITKJAP/0341024 1000000000 WUHDZBA, Tanggal 15 Oktober	CV. TIGA CAHAYA ELZAN	0001 1904/08.08.21.1.06.00 3575A57/ DP/8104/02/025, Tanggal 23 Oktober 2025	Buk	SEKRETARIAT
21		AC	PANASONIC				1	Unit	4.218.000	4.218.000	Sub Kegiatan Persiapan Pemasangan dan Perawatan Kantor Provinsi TA.2025	21.0010.010 001421.512.0 5.2.14.0.00.0 5.0000.PP/1 1/2025	EP - DITKJAP/8104/P 000000010231 0, Tanggal 15 Oktober 2025	CV. TIGA CAHAYA ELZAN	00011844/0.08.23.1.0 1.0003/BAST/DP/SAP 2025/2025, Tanggal 23 Oktober 2025	Buk	SEKRETARIAT
22		AC	PANASONIC				1	Unit	9.157.000	9.157.000							

No	FOTO GAMBAR	NAMA BARANG	SERIK TYPE	MONITOR			JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA Rp.	KETERANGAN (nama Kegiatan)	NO SP2D	NO KONTRAK/UNDAP	NAMA PIHAK KETIGA	NO BAST/HP	KET	PEMAKAI BARANG
				RAHSIA	MESIN	POLISI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23		LAPTOP	ACER ASPIRE 5 15.6" (40.64 cm) Intel Core i5-1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Windows 11				1	Unit	10.540.000	21.080.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Kantor Provinsi TA 2025	21.0004.00 001204.02.0 8.2.14.0.00.0 8.0000.PRM 10225	EP - 01K17FFDCXWAG WBNWFBMQUAA 1632, Tanggal 17 Oktober 2025	CV. UNIBROO	002 190.00.00.01.1.00.00 00.BAST/ORGAP/00 2025, Tanggal 23 Oktober 2025	Bak	KB, SEKRETARIAT
24		PC KOMPUTER	ACER HYPER FLEX S INTEL CORE I5-12450H 16GB DDR5 512GB SSD Windows 11				1	Unit	10.767.000	21.024.000							KB
25		Filing Cabinet	Filing Cabinet 4 Laci				8	Unit	5.544.400	33.566.700	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Rujukan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan	21.0004.00 001204.02.0 8.2.14.0.00.0 8.0000.PRM 10225	EP - 01K17FFDCXWAG WBNWFBMQUAA 1632, Tanggal 22 Oktober 2025	CV. CAHAYA PRATAMA	002 190.00.00.01.1.00.00 00.BAST/ORGAP/00 2025, Tanggal 23 Oktober 2025	Bak	LAPID
26		Rak Buku	Rak Buku Pentapanel 4 Susun				1	Buah	5.544.400	5.544.400							
27		Tas	Tas Tas Tas				3	Unit	5.530.300	16.591.700							
28		Kursi	Kursi Kursi Kursi				5	Unit	3.318.300	16.591.500							

No	FOTO GAMBAR	NAMA BARANG	BESK TYPE	NOMOR			JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA Rp.	KETERANGAN (Keterangan)	(nama	NO SP2D	NO KONTRAK NO SP	NAMA PIHAK KETIGA	NO BASTIP	KET	PEMANGGIL BARANG
				RANGKA	REVISI	POLISI												
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14			
29		Loker Penyimpanan	Loker Penyimpanan Lantai Pabean MAB Pribu				2	Unit	2.205.000	4.410.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Publik Layanan Bagi Pemohonan Kurban Korban Kementerian Pertanian		21.00/04.00 001044/02.0 02.14.0.00.0 8.0000/PP/1 1/2025	EP- 010346/04/THP 19010404/02/0 0, Tanggal 22 Agustus 2025	CV. CAHAYA PRATAMA	005/184.02.00.01.0 2.0000/BAST/02/04/2025 Tanggal 15 Oktober 2025	Rak	UPTD
30		Sofa Tami Minimalis	Sofa Tami Minimalis				1	Unit	5.538.000	5.538.000								
31		Meja Kerja	Meja Kerja 1/2 Biru				1	Unit	2.763.000	2.763.000								
32		Meja Makan	Meja Makan 6 Kursi				1	Unit	5.538.000	5.538.000								
33	 	KABINET	PANASONIC				3	Unit	7.380.000	22.140.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		21.00/04.00 001044/02.0 02.14.0.00.0 8.0000/PP/1 0/2025	005/201.02.00.01 1.00.0000/SP/04 SAP2K0 1/2024, 21 Oktober 2024	PT RAJA ARHASTA PRATAMA	005/204.02.00.01 1.00.0000/BAST/02/04/2025 AFONDI/2024, 24 Oktober 2025	Bak	SEKRETARIAT

No	FOTO GAMBAR	NAMA BARANG	MERK TYPE	NOMOR			JURUSAN	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA Rp.	KETERANGAN (Nama Kegiatan)	NO SP2D	NO KONTRAKING EP	NAMA PIHAK KETIGA	NO BASTHP	REK	PEMAKAI BARANG
				RANGKAI	MEKUN	POKUS											
24		Kursi Kayu	Kursi Kayu				2	Buah	550.000	1.100.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Keluarga Praktek	21.0004.350.001014.000.00.2.14.0.00.0.0.00001P9R12/12/2025	EP-01KJUEGOWW071250220022RNVW-AD01, Tanggal 26 Agustus 2025	CV. CAHYA PRATAMA	000184452.06.00.1.0.2.0002BASTHP3AP2K82025, Tanggal 15 Oktober 2025	Buk	UPTD
25		Kotak Serat	Kotak Serat				1	Sat	522.000	522.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Keluarga Praktek	21.0004.000.001014.000.00.2.14.0.00.0.0.00001P9R12/12/2025	EP-01KJUEGOWW071250220022RNVW-AD01, Tanggal 26 Agustus 2025	CV. CAHYA PRATAMA	000184452.06.00.1.0.2.0002BASTHP3AP2K82025, Tanggal 15 Oktober 2025	Buk	UPTD
26		Perhitungan	Perhitungan				2	Buah	248.000	496.000							
										332.712.290							



Mengetahui:

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALAN PERUBAHAN DAN KB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

OLIMPIADUN, S.Pd., M.H.
Penata Muda Utama
NIP.19710325 198603 1 008

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
PENJURUS BARANG PENGELOLA
DAN PENJURUS BARANG PENGENDALAN

REETY LIDYANNINGSIH, AMR
Penata Muda Tk.1
NIP.19880112 201901 2 004

LAPORAN TAHUNAN (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2025
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : DINAS PEMBANGUNAN TERPADU, PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PENGUCUR DAN KIB

NO	LAMBAR FOTO	JENIS NAMA BARANG	KONSTRUKSI		LUAS LANTAI (M ²)	LETAK ALAMAT	DOKUMEN FOTOKOPI		PENGALAMAN	PENILAIAN	RUMAH	TOTAL	TANGGAL PEMERIKSAAN	NO SPK	NO KONTRAK	NAMA KEDIRIAN	NAMA PRIBADI KETUA	PCT
			BETON	BERTINGKAT			Tanggal	Skala										
1		Gedung 30 Bangunan	TA	TA	-	J. KAT					1.075.387.000	1.075.387.000	2025	11.079.00000 M.07.00.00.00 1.075.387.000	4000.0.000 H.07.00.00.00000	Kantor Dinas Pendidikan Lantai 1-3 Kantor Dinas Pendidikan	Dr. H. H. H. H.	
2		Gedung 30 Bangunan	TA	TA	-	J. KAT					1.075.387.000	1.075.387.000	2025	11.079.00000 M.07.00.00.00 1.075.387.000	4000.0.000 H.07.00.00.00000	Kantor Dinas Pendidikan Lantai 1-3 Kantor Dinas Pendidikan	Dr. H. H. H. H.	
TOTAL												2.150.774.000						



Tanjungpinang, 11 Desember 2025
 PENGUKUR BARANG PERSELOA
 DAN PENGUKUR BARANG PERSELOA

 SEPTI LESTARIANING, AM
 Kepala Baku Tk. I
 NP 0880112 00101 2 004

LAPORAN TAHUNAN (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2025
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No Urut	Foto Barang	Jenis Barang	Letak / Lokasi	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	TAHUN PEMBELIAN	Harga	NO SP2D	NO KONTRAK	NAMA KEGIATAN	NAMA PIHAK KETIGA	Ket
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TOTAL												



Tanjungpinang, 31 Desember 2025
 PENGURUS BARANG PENGELOLA
 DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA

[Signature]
 RESTY LIQYANINGSIH, AMK
 Penata Muda Tk. I
 NIP.19890112 201101 2 004

LAPORAN TAHUNAN (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2025
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

PROVINSI
SATUAN KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

[illegible]

Mengetahui :

KEPILAIAN PEMERPOYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENDIDIKAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BURHANUDDIN, S. Hut., M.H.
Pembina Utama Muda
No. 19710320199803 1 008

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
PENURUS BARANG PENGELOLA DAN
PENURUS BARANG PENGGUNA

RESTY LIDYANINGSIH, AMK
Penata Muda Tk. I
NIP.19890112 201101 2 004

SKPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI	: Kepulauan Riau
JENIS BARANG	: Baranja Natura dan Pakan - Natura

[illegible]

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 PROVINSI : Kepulauan Riau
 JENIS BARANG : Belanja Barang Untuk Dikawatirkan Lainnya

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0040

RUMAH KEPERAWATAN - KETERANGAN																								
NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Pekanan	PENGELOMPOKAN							PENGELOMPOKAN							HSA				KETERANGAN
						Komponen Biaya Akut Pemeriksaan Rutin	Tgl. BA	Jumlah	Saluran Rutin	Harga Satuan	Harga Total	Disalurkan Kepada	Komponen Biaya Akut Sesuai Tertentu	Tgl. BAST	Jumlah	Saluran Rutin	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Saluran Rutin	Harga Satuan	Harga Total		
1	Baju Kado Lengan Panjang Berwarna, Warna Biru, Bincu Tampak, Emerald Blue Bahan Anyam, Ukuran Custom, Size S,M,L,XL,XXL,XXXL		Belanja AkutBahan - Belanja Barang untuk Dikawatirkan Lainnya	Teg Pengobatan Strategis Opuscular Adjuvant Protonic untuk Kanker Lokal	CV. TIGA CAHAYA 25.2140	025186.6214.03.1.01.000 015APB01PAP0802025	17-Oct-25	360	Pcs	108.000,00	178.885.025,00	PR	025186.6214.03.1.01.000 15APB01PAP0802025	17-Oct-25	360	Pcs	108.000,00	178.885.025,00						TRIL
											178.885.025,00							178.885.025,00						
											178.885.025,00							178.885.025,00						
											178.885.025,00							178.885.025,00						

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Kepri

 BURHANUDDIN, S.Hut., M.H.
 Pembantu Utama Muda
 NIP.19710320 198803 1 008

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
 Pengurus Barang Pengguna


 RESTY LIDYANINGSIH, A.Mk.
 Penata Muda Tk. I
 NIP.198901122011012004

6	Baru Merah (Capless 2.5 Lar. 5 Tombol Kecepatan, Fergasi Akurat, Dlaye 33 watt, Mirror Face Glass)	Barang Jaring UMK Dipakai/Jasa/Barang Khusus Masyarakat	Kec. Pengembangan Kegiatan Masyarakat, UMK Perungutan, Kualitas Keluarga Kewenangan Pemerintah T.A. 2025	CV SINAR PERKASA AMULIA	625980100301411010000 JAMPSAMPUNG/2025	12.10.25	40	Bulan	48.550,00	20.964.900,00	KmP	00500030030141101 00016043100540000 /025	12.10.25	40	Bulan	440.000,00	20.964.900,00						SDH
										20.964.900,00							20.964.900,00						
										221.182.820,00							221.182.820,00						



Tanjungpinang, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Ponggins

RESTY LIOYANINGSIH, A.M.
Pembina Muda Tk. I
NIP. 198801122011012004

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI	Kepulauan Riau
JENIS BARANG	Betara Obat-Obatan Lainnya

[illegible]

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna

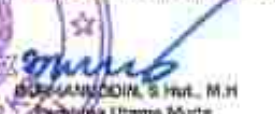
RESTY LIYANINGSIH, A.Mk
Pusat Mula Tk. I
NIP.19801122011012064

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVING : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Baranja Obat-Obatan-Obat

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0037

KIRMAN 6.1.02.01.01.0007																						
NO	NAMA BARANG	Bentuk Tipe	Jenis Barang	Nama Kegiatan	Revisi	PENERIMAAN						PENGELUARAN						SISA				KETERANGAN
						Barang Berda Rata Penerimaan Barang	Tgl. PA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Obat/Ran Ekskusi	Barang Berda Rata Terima	Tgl. BAS	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	
1	Resep/Rekordin Obat		Obat Obat Obat- Obat	Keg. Pengentongan Stoking Oseasional Adolesen Perempuan remaja Kecamatan Cokol	PT. KIRMA FARMA APOTEK UD TANJUNGPINANG	02010300214.03.1.01.000 02010300214.03.1.01.000	25-12-25	30	Box	50.000,00	1.500.000,00	K3	02010300214.03.1.01.000 02010300214.03.1.01.000	30	Box	50.000,00	1.500.000,00					Sisa
	Resep/Rekordin Mullekutan dan Mineral @120							1	Box	804.950,00	804.950,00			1	Box	804.950,00	804.950,00					
	Barang Pengiriman							1	Box	5.000,00	5.000,00			1	Box	5.000,00	5.000,00					
											2.374.950,00							2.374.950,00				
											2.374.950,00							2.374.950,00				
						TOTAL					2.374.950,00							2.374.950,00				

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan
Riau

DARYANTO DINA, S. Hut., M.H.
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19710325 198803 1 008

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna


RESTY LIDYANINGSIH, A.M.
Penata Muda Tk. I
NIP. 198801122011012004

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 PROVINSI : Kepulauan Riau
 JENIS BARANG : Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0036

DAFTAR KETERANGAN 1.0.1.02.01.01.0000																								
NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekanan	PENERIMAAN							PENDELUAHAN							SGA				KETERANGAN
						Nilai Berita Acara Penerimaan Swang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Disalutkan Kepada	Nilai Berita Acara Serah Terima	Tgl. DAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total		
1	Seminar Kit		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Keg. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKAS A MULIA	025/12.02.08.04.1.01.0003BAPB/OP3AP2K8/2025	20-Jan-25	200	Paket	215.000,00	43.000.000,00	SEKRETARIAT	025/12.02.08.04.1.01.0003BAST/OP3AP2K8/2025	20-Jan-25	200	Paket	215.000,00	43.000.000,00					NIHL	
	Tas Pelatihan																							
	Apron/Cekmek																							
	Note Book																							
	Peta, Pinal, Penghapus, Pensil, Penggaris																							
											43.000.000,00							43.000.000,00						
2	Pakaian/Baju Wanita		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Keg. Roadshow dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Korban Sapi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKAS A MULIA	025/10.12.08.03.1.02.0002BAPB/OP3AP2K8/2025	18-Jun-25	9	Pis	99.900,00	899.100,00	UPT	025/10.12.08.03.1.02.0002BAST/OP3AP2K8/2025	18-Jun-25	9	Pis	99.900,00	899.100,00					NIHL	
											899.100,00							899.100,00						
3	Seminar Kit		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	CV. RAHMAT AGADI	025/10B2.00.04.1.02.0002BAPB/OP3AP2K8/2025	26-Jun-25	35	Paket	214.730,00	7.515.550,00	K-IP	025/10B2.00.04.1.02.0002BAST/OP3AP2K8/2025	26-Jun-25	35	Paket	214.730,00	7.515.550,00					NIHL	
											7.515.550,00							7.515.550,00						
4	Seminar Kit		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Keg. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKAS A MULIA	025/70.02.08.04.1.01.0003BAPB/OP3AP2K8/2025	25-Apr-25	332	Paket	193.900,00	64.374.800,00	SEKRETARIAT	025/70.02.08.04.1.01.0003BAST/OP3AP2K8/2025	25-Apr-25	332	Paket	193.900,00	64.374.800,00					NIHL	
	Tas Pelatihan																							
	Apron/Cekmek																							
	Note Book																							
	Peta, Pinal, Penghapus, Pensil, Penggaris																							
											64.374.800,00							64.374.800,00						
5	Baju Olahraga Lengan Panjang Sutra Set Model Tanki Panjang Berkerah, Sabuk Jepan dan Belahang -Catana Training		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Keg. Advokasi Kegiatan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKAS A MULIA	025/192.02.08.03.1.01.0002BAPB/OP3AP2K8/2025	27-Oct-25	11	Buah	398.270,00	4.380.970,00	PIR	025/192.02.08.03.1.01.0002BAST/OP3AP2K8/2025	27-Oct-25	11	Buah	398.270,00	4.380.970,00					NIHL	
	Seminar Kit, Tas Seminar + Note Book dan Peta Berda Melati							50	Paket	214.220,00	10.711.500,00				50	Paket	214.220,00	10.711.500,00						
												15.072.470,00							15.072.470,00					

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0035

NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Pakawan	PENERIMAAN						PENGELUARAN						SISA				KETERANGAN	
						Nomor Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Desain dan Rupa	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. BAS	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan		Harga Total
1	Gadya Bag		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Keg. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/21-02.06.02.1.02.000/BAPSD/PSAP/KB/2025	5-Feb-25	200	Buah	7.900,00	1.580.000,00	SEKRETARIAT	025/21-02.06.02.1.02.000/BAST/DPSPAP/KB/2025	5-Feb-25	200	Buah	7.900,00	1.580.000,00					NIL
	Handuk Kaki Jaki Logo Border							100	Buah	14.500,00	1.450.000,00				100	Buah	14.500,00	1.450.000,00					
											7.030.000,00							7.030.000,00					
2	Geddi Tumbler		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Keg. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/21-02.06.02.1.02.000/BAPSD/PSAP/KB/2025	5-Feb-25	40	Pcs	173.500,00	6.940.000,00	REKREASI	025/21-02.06.02.1.02.000/BAST/DPSPAP/KB/2025	5-Feb-25	40	Pcs	173.500,00	6.940.000,00					NIL
											6.940.000,00							6.940.000,00					
3	Kan Bata		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Keg. Pengembangan Strategi Operasional Adaptasi Program Kecamatan Kuantan Loka	CV. TIGA CAHAYA ELZIAN	025/186-02.14.03.1.01.000/1/BAPSD/PSAP/KB/2025	17-Oct-25	50	Pcs	498.300,00	24.915.000,00	KB	025/186-02.14.03.1.01.000/1/BAST/DPSPAP/KB/2025	17-Oct-25	50	Pcs	498.300,00	24.915.000,00					NIL
	Ministar Tampak Full Set							100	Set	208.800,00	20.880.000,00				100	Set	208.800,00	20.880.000,00					
	Good Bag							500	Buah	7.104,00	3.552.000,00				500	Buah	7.104,00	3.552.000,00					
	Tumbler Stainless Galon = Box Ukuran 500 ml							800	Buah	165.988,50	132.711.600,00				800	Buah	165.988,50	132.711.600,00					
											192.174.300,00							192.174.300,00					
4	Gadya Bag		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Keg. Advokasi, Edukasi dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/202-02.06.02.1.02.000/AMAPSD/PSAP/KB/2025	10-Nov-25	200	Buah	7.548,00	1.509.600,00	SEKRETARIAT	025/202-02.06.02.1.02.000/BAPSD/PSAP/KB/2025	10-Nov-25	200	Buah	7.548,00	1.509.600,00					NIL
	Jasbdi							50	Pcs	41.070,00	2.053.500,00				50	Pcs	41.070,00	2.053.500,00					
	Makut							3	Buah	688.400,00	1.795.200,00				3	Buah	688.400,00	1.795.200,00					
											5.357.300,00						5.357.300,00						
5	Tas Selebih (Bahan Ringan dan Tahan Lama, Tahan Air, Tas Bahan, Ukuran 35x17x40, Matrik Logo dan Uniq)		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Keg. Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/186-02.06.02.1.02.000/4/BAPSD/PSAP/KB/2025	4-Nov-25	100	Buah	298.700,00	29.870.000,00	SEKRETARIAT	025/186-02.06.02.1.02.000/BAST/DPSPAP/KB/2025	4-Nov-25	100	Buah	298.700,00	29.870.000,00					NIL
											29.870.000,00							29.870.000,00					

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

BKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 PROVINSI : Kepulauan Riau
 JENIS BARANG : Belanja Alat/Bahan - Peralengkapan Pendukung Olahraga

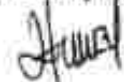
KODE REKENERING : 5.1.02.01.01.0034

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0034																								
NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekening	PENERIMAAN							PENYERUPSIAN							GSA				KETERANGAN
						Nomor Berita Acara Penyerupsiaran Barang	Tgl. BA	Jumlah	Setoran Barang	Harga Satuan	Harga Total	Diselurukan Kepada	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. SAST	Jumlah	Setoran Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Setoran Barang	Harga Satuan	Harga Total		
1	Pakaian Olahraga (T. 2015)		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Peralengkapan Pendukung Olahraga	Kep. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kawenangan Provinsi T.A 2025		025/101/E.06.04.1.02.00 075BAP5/DP3AP2KXB2025	16-Jun-25	42	Pcs	104.340,00	4.382.280,00	KHP	025/101/E.06.04.1.02.00 025BAP5/DP3AP2KXB2025	16-Jun-25	42	Pcs	104.340,00	4.382.280,00						1416L
											4.382.280,00							4.382.280,00						
						TOTAL					4.382.280,00							4.382.280,00						

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Kepri


SUBHANUDDIN, S.Fut., M.H.
 Pejabat Utama Muda
 NIP.19710220 199803 1 008

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
 Pengurus Barang Pengguna


RESTY LIDYAHINGSIH, A.Ms.
 Penata Muda Tk. I
 NIP.198901122011012004

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 PROVINSI : Kepulauan Riau
 JENIS BARANG : Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0031

NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekanan	PENERIMAAN					Diketahui Kepala	PENGLAJUAN					SSA				KETERANGAN		
						Nomor Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. SAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total		
1	Beli Alat Pinta Wireless		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/862.08.01.1.06.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	26-May-25	2	Buah	110.900,00	221.800,00	SEKRETARIAT	025/862.08.01.1.06.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	26-May-25	2	Buah	110.900,00	221.800,00					Nihil
	Batu Baterai AA (2+1)							30	Buah	15.900,00	477.000,00				30	Buah	15.900,00	477.000,00					
	Stasiun 3-kaki							10	Buah	18.600,00	186.000,00				10	Buah	18.600,00	186.000,00					
	Kabel Roll 10 Meter 10A dan 13A							5	Roll	223.700,00	1.118.500,00				5	Roll	223.700,00	1.118.500,00					
	Batu Baterai AAA (2+1)							30	Buah	13.900,00	417.000,00				30	Buah	13.900,00	417.000,00					
	Rumah Lampu TL Tahan							10	Buah	86.200,00	862.000,00				10	Buah	86.200,00	862.000,00					
											3.302.300,00							3.302.300,00					
2	Lampu LED Cool Daylight 15 Watt		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/1392.08.01.1.06.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	12-Aug-25	30	Buah	81.686,00	2.450.880,00	SEKRETARIAT	025/1392.08.01.1.06.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	12-Aug-25	30	Buah	81.686,00	2.450.880,00					Nihil
	Lampu TL 36 Watt							20	Buah	58.940,00	1.198.800,00				20	Buah	58.940,00	1.198.800,00					
											3.649.680,00							3.649.680,00					
3	Blower 10 /mm		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	CV. TIGA CAHAYA ELZANI	025/190.02.08.01.1.06.0002/BA/BOP3AP2KB/2025	27-Oct-25	1	Pcs	1.500.000,00	1.500.000,00	SEKRETARIAT	025/190.02.08.01.1.06.0002/BA/BOP3AP2KB/2025	27-Oct-25	1	Pcs	1.500.000,00	1.500.000,00					Nihil
											1.500.000,00							1.500.000,00					
4	Baterai C90 BPH Max		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Keg. Penyediaan Layanan Pemeliharaan Kueses Hddup Anak Kewenangan Provinsi T.A.2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/106.02.08.05.1.02.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	31-Oct-25	6	Pcs	45.000,00	270.000,00	PA	025/106.02.08.05.1.02.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	31-Oct-25	6	Pcs	45.000,00	270.000,00					Nihil
	Bola lampu 24 watt							6	Pcs	80.700,00	484.200,00				6	Pcs	80.700,00	484.200,00					
											754.200,00							754.200,00					
5	Batu Baterai (AAA 2+1)		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Provinsi T.A.2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/206.02.08.01.1.06.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	14-Nov-25	2	Pcs	15.000,00	30.000,00	UPD	025/206.02.08.01.1.06.0001/BA/BOP3AP2KB/2025	14-Nov-25	2	Pcs	15.000,00	30.000,00					Nihil
	Kabel Listrik (VARIAS Kabel Roll 10 m)							1	Pcs	244.000,00	244.000,00				1	Pcs	244.000,00	244.000,00					
	Bola Lampu 15 watt							8	Pcs	28.000,00	188.000,00				8	Pcs	28.000,00	188.000,00					
	Bola Lampu 18 watt							7	Pcs	34.000,00	238.000,00				7	Pcs	34.000,00	238.000,00					
	Stasiun Kaps 3							3	Pcs	20.000,00	60.000,00				3	Pcs	20.000,00	60.000,00					
											740.000,00							740.000,00					
	Batu Baterai AA (2+1)		Belanja Alat/Bahan	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi	CV. SINAR	025/106.02.08.01.1.06.0001/BA/BOP3AP2KB/2025		10	Pcs	15.484,50	154.845,00				10	Pcs	15.484,50	154.845,00					
	Batu Baterai (AAA 2+1)							10	Pcs	18.537,00	185.370,00				10	Pcs	18.537,00	185.370,00					

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI RABES
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025
SEMESTER II TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Bahan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor

KODE REKENING : 8.1.82.01.01.0030

KODE KEUANGAN : 81.02.01.01.0030																							
NO	NAMA BARANG	Metode Type	Jenis Kelangka	Nama Kegiatan	Rumahan	PENERIMAAN					Distribusi Kepada	PENGELUARAN					SISA				KETERANGAN		
						Nomor Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan		Harga Total	Nomor Berita Acara Sisa/ Teraim	Tgl. BAS?	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang		Harga Satuan	Harga Total
1	Pengharum Ruangan Aerosol		Bahan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persbdt Kantor	Keg. Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga pd DP3AP2K5	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/29.m/2.08.01.1.06.000/BAPODIPSA/2K5/2025	17-Feb-25	35	Buah	30.900,00	1.112.400,00	SEKRETARIA	025/29.m/2.08.01.1.06.000/BAST/DP3AP2K5/2025	17-Feb-25	35	Buah	30.900,00	1.112.400,00					NHL
	Alat Pel Original Super Mop							2	Buah	198.000,00	396.000,00				2	Buah	198.000,00	396.000,00					
	Anti-air pel dan Lap (Onesko)							10	Buah	35.500,00	355.000,00				10	Buah	35.500,00	355.000,00					
	Sek Mop							6	Buah	84.000,00	504.000,00				6	Buah	84.000,00	504.000,00					
	Pembersih Kaca 440 ml							24	Pcs	19.500,00	468.000,00				24	Pcs	19.500,00	468.000,00					
	Pembersih Lantai Sukan Lantai 900 ml							24	Buah	20.600,00	494.400,00				24	Buah	20.600,00	494.400,00					
	Kantong Sampah Ukuran Sedang							24	Buah	29.000,00	696.000,00				24	Buah	29.000,00	696.000,00					
	Karat Kaki Bihun (Welcome 400g)							10	Buah	64.200,00	642.000,00				10	Buah	64.200,00	642.000,00					
	Bahan Cumi Piring 5 Ltr							3	Pcs	118.000,00	354.000,00				3	Pcs	118.000,00	354.000,00					
	Sapu Panjang 115 cm							12	Buah	50.500,00	606.000,00				12	Buah	50.500,00	606.000,00					
	Sapu Jari/Sapu karat gagang 110 cm							6	Buah	41.400,00	248.400,00				6	Buah	41.400,00	248.400,00					
	Wipol (Kantor)							12	Pcs	14.400,00	172.800,00				12	Pcs	14.400,00	172.800,00					
	Kepor Barus putih bundkus 14/1000							2	Bungkus	122.500,00	245.000,00				2	Bungkus	122.500,00	245.000,00					
	Okrah/serokan plastik							4	Buah	58.500,00	234.000,00				4	Buah	58.500,00	234.000,00					
									6.590.000,00							6.590.000,00							
2	Cling Kaca 440 ml		Bahan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persbdt Kantor	Keg. Penyediaan Layanan Pengkajian Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi T A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/71.g/2.08.06.1.02.000/BAPODIPSA/2K5/2025	28-Apr-25	9	Botol	10.500,00	99.000,00	P-H	025/71.g/2.08.06.1.02.000/BAST/DP3AP2K5/2025	28-Apr-25	9	Botol	10.500,00	99.000,00					NHL
	Pembersih Lantai 900 ml							5	Botol	15.000,00	77.500,00				5	Botol	15.000,00	77.500,00					
	Bahan Cumi Piring 750 ml							4	Bungkus	22.100,00	88.400,00				4	Bungkus	22.100,00	88.400,00					
	Isu Facial 1000 g							8	Pcs	59.000,00	472.000,00				8	Pcs	59.000,00	472.000,00					
									738.900,00							738.900,00							
3	Catrol Sabun Mandi		Bahan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persbdt Kantor	Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Sgk Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi T A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/101.g/2.08.03.1.02.000/BAPODIPSA/2K5/2025	18-Jun-25	8	Botol	24.753,00	198.024,00	UPTD	025/101.g/2.08.03.1.02.000/BAST/DP3AP2K5/2025	18-Jun-25	8	Botol	24.753,00	198.024,00					NHL
	Handuk							8	Buah	58.941,00	471.528,00				8	Buah	58.941,00	471.528,00					
	Sabun							8	Botol	38.184,00	305.472,00				8	Botol	38.184,00	305.472,00					
									975.024,00							975.024,00							
4	Handuk		Bahan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persbdt Kantor	Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi T A 2025 (IAK Non Fask)	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/196.g/2.08.07.1.02.000/BAPODIPSA/2K5/2025	31-Oct-25	8	Pcs	52.000,00	416.000,00	UPTD	025/196.g/2.08.07.1.02.000/BAST/DP3AP2K5/2025	31-Oct-25	8	Pcs	52.000,00	416.000,00				NHL	

[illegible]

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Belanja Bahan- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0028

NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Retansi	PENERIMAAN						PENGELUARAN						SISA				KETERANGAN	
						Nomor Bantu Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Dianjukan Kepada	Nomor Bantu Acara Serah Terima	Tgl. BAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan		Harga Total
1	Fotocopy		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Keg. Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/BS/2.08.03.1.01.000/BA-APB/DP3AP2KB/2025	17-Apr-25	1870	Lembar	500	935.000.0000	LPTD	025/BS/2.08.03.1.01.000/BA-ST/DP3AP2KB/2025	17-Apr-25	1870	Lembar	500	935.000.00					NIHIL
											935.000.0000							935.000.00					
2	Fotocopy		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Keg. Penelitian Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/107.02.08.03.1.03.000/2/BAPB/DP3AP2KB/2025	26-Jun-25	3152	Lembar	450	1.418.400.0000	PHP	025/107.02.08.03.1.03.000/2/BAST/DP3AP2KB/2025	25-Jun-25	3152	Lembar	450	1.418.400.00					NIHIL
											1.418.400.0000							1.418.400.00					
3	Fotocopy LS Belanja Barang dan Jasa		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Keg. Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi sesuai Kasifan Lokal	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/185.02.14.03.1.01.000/1/BA-PB/DP3AP2KB/2025	16-Oct-25	1576	Lembar	500	788.000.0000	KB	025/185.02.14.03.1.01.000/1/BAST/DP3AP2KB/2025	16-Oct-25	1576	Lembar	500	788.000.00					NIHIL
											788.000.0000							788.000.00					
4	Fotocopy		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Keg. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/169.02.08.03.1.02.000/1/BA-PB/DP3AP2KB/2025	25-Sep-25	500	Lembar	500	250.000.0000	LPTD	025/169.02.08.03.1.02.000/1/BAST/DP3AP2KB/2025	25-Sep-25	500	Lembar	500	250.000.00					NIHIL
											250.000.0000							250.000.00					

5	Fotocopy Ukuran sama F/A4		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Admini- strasi Tender	Keg. Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Layanan Perlindungan Punah-pun Kewenangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025/192.d/2.08.03.1.01.000/ BAPB/2025	27-Oct-25	911	Lembar	500	455.500,0000	PHP	025/192.d/2.08.03.1.01.000/ BAST/2025	27-Oct-25	311	Lembar	500	455.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	---------------------------------	--	--	---	-------------------------------	--	-----------	-----	--------	-----	--------------	-----	--	-----------	-----	--------	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanjungpinang, 31 Desember 2024
Pengurus Barang Pengguna

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0027

NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekanan	PENERIMAAN							PENGELUARAN							SISA				KETERANGAN	
						Nomor Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Dilampirkan Kepada	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. BAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total			
1	Meterai		Belanja Alat/Bahan Benda Pos	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	POS IND			100	Lembar	10.000,00	1.000.000,00	SEKRETARIAT			100	Lembar	10.000,00	1.000.000,00							NIHIL
											1.000.000,00							1.000.000,00							
2	Meterai		Belanja Alat/Bahan Benda Pos	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	POS IND			100	Lembar	10.000,00	1.000.000,00	SEKRETARIAT			100	Lembar	10.000,00	1.000.000,00							NIHIL
											1.000.000,00							1.000.000,00							
3	Meterai		Belanja Alat/Bahan Benda Pos	Persediaan Bahan Logistik Kantor	POS IND			80	Lembar	10.000,00	800.000,00	SEKRETARIAT			80	Lembar	10.000,00	800.000,00							NIHIL
											800.000,00							800.000,00							
4	Meterai		Belanja Alat/Bahan Benda Pos	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewirausahaan Provinsi	POS IND			50	Lembar	10.000,00	500.000,00	PHP			50	Lembar	10.000,00	500.000,00							NIHIL
											500.000,00							500.000,00							
5	Meterai		Belanja Alat/Bahan Benda Pos	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewirausahaan Provinsi	POS IND			100	Lembar	10.000,00	1.000.000,00	SEKRETARIAT			100	Lembar	10.000,00	1.000.000,00							NIHIL
											1.000.000,00							1.000.000,00							
6	Meterai		Belanja Benda Pos (Meterai)	Keg. Persediaan Bahan Logistik Kantor T.A 2025	PT POS			170	Lembar	10.000,00	1.700.000,00	SEKRETARIAT			170	Lembar	10.000,00	1.700.000,00							NIHIL
											1.700.000,00							1.700.000,00							

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0026

NO	NAMA BARANG	Merk/Typ	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekening	PENERIMAAN						PENJELUARAN						SISA				KETERANGAN	
						Nomor Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Deskripsi Kegiatan	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. DAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan		Harga Total
1	Cetak Buku Superlat Kelas II		Belanja Alat/Bahan Bahan Cetak	Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	02529/g2.08.01.1.02.0006/BAP/DP3AP2KB/2025	17-Feb-25	4	Buah	465.000,00	1.860.000,00	SEKRETARIAT	02529/g2.08.01.1.02.0006/BAST/DP3AP2KB/2025	17-Feb-25	4	Buah	465.000,00	1.860.000,00					NHL
											1.860.000,00							1.860.000,00					
2	Cetak Buku Superlat Kelas II		Belanja Alat/Bahan Bahan Cetak	Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	02529/g2.08.01.1.01.0006/BAP/DP3AP2KB/2025	17-Feb-25	3	Buah	485.000,00	1.455.000,00	SEKRETARIAT	02529/g2.08.01.1.01.0006/BAST/DP3AP2KB/2025	17-Feb-25	3	Buah	485.000,00	1.455.000,00					NHL
											1.455.000,00							1.455.000,00					
3	Cetak Spanduk Peltahan Tata Baga I (4 X 5 meter)		Belanja Alat/Bahan Bahan Cetak	Keg. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	02529/g2.08.04.1.01.0003B/APND/DP3AP2KB/2025	7-Feb-25	20	Meter	85.000,00	1.700.000,00	SEKRETARIAT	02529/g2.08.04.1.01.0003B/AST/DP3AP2KB/2025	7-Feb-25	20	Meter	85.000,00	1.700.000,00					NHL
											1.700.000,00							1.700.000,00					
4	Cetak Spanduk Peltahan Tata Baga II (4 X 5 meter)		Belanja Alat/Bahan Bahan Cetak	Keg. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	02561/g2.08.04.1.01.0003B/APND/DP3AP2KB/2025	11-Apr-25	20	Meter	85.470,00	1.709.400,00	SEKRETARIAT	02561/g2.08.04.1.01.0003B/AST/DP3AP2KB/2025	11-Apr-25	20	Meter	85.470,00	1.709.400,00					NHL
	Cetak Spanduk Peltahan Tata Baga III (4 X 5 meter)							20	Meter	85.470,00	1.709.400,00				20	Meter	85.470,00	1.709.400,00					
	Cetak Spanduk Peltahan Tata Baga IV (4 X 5 meter)							20	Meter	85.470,00	1.709.400,00				20	Meter	85.470,00	1.709.400,00					
											5.128.200,00							5.128.200,00					
5	Cetak Spanduk Uraian Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030 sebanyak 2 lembar (1 x 5 meter)		Belanja Alat/Bahan Bahan Cetak	Keg. Advokasi Ketipidan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	02533/g2.08.02.1.02.0004B/APND/DP3AP2KB/2025	21-Feb-25	10	Meter	52.000,00	520.000,00	SEKRETARIAT	02533/g2.08.02.1.02.0004B/AST/DP3AP2KB/2025	21-Feb-25	10	Meter	52.000,00	520.000,00					NHL
											520.000,00							520.000,00					
6	Cetak Spanduk MUSDA N BKOW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (1 x 5 meter)		Belanja Alat/Bahan Bahan Cetak	Keg. Advokasi Ketipidan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	02554/g2.08.02.1.02.0004B/BAPND/DP3AP2KB/2025	24-Mar-25	5	Meter	52.780,40	263.902,00	SEKRETARIAT	02554/g2.08.02.1.02.0004B/AST/DP3AP2KB/2025	24-Mar-25	5	Meter	52.780,40	263.902,00					NHL
	Name Tag 2 set bahan 10 Card + Tali							100	Pcs	52.780,50	5.278.050,00				100	Pcs	52.780,50	5.278.050,00					
											5.541.952,00							5.541.952,00					
7	Cetak Buku Uraian SKTOM sebanyak 10 buah (Bahan V nty)		Belanja Alat/Bahan Bahan	Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Teknologi Kewenangan Provinsi	CV. GUNA SARANATA	02586/g2.08.07.1.03.0006B/APND/DP3AP2KB/2025	22-May-25	10	Tbk	12.900.000,00	129.000.000,00	PIH	02586/g2.08.07.1.03.0006B/AST/DP3AP2KB/2025	22-May-25	10	Tbk	12.900.000,00	129.000.000,00					NHL

[illegible]

[illegible]

16	Kertas Concorde F4 90	Untuk Kegiatan Kantor/Kertas	Bahan Logistik Kantor	MULA	APBUD/PAK/2025		1	Rim	292.707,00	292.707,00		BAST/DP/PAK/2025		1	Rim	292.707,00	292.707,00				
										4.283.782,00							4.283.782,00				
16	Kertas A4 70 Gr	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover	Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perencanaan Perempuan Kawasan Provinsi T.A.2025	CV. SINAR PERKASA MULA	025/192/02.08.03.1.01.0002/BAPB/2025	27-Oct-25	25	Rim	64.156,00	1.603.950,00	PHA	025/192/02.08.03.1.01.0002/BAST/2025	27-Oct-25	25	Rim	64.156,00	1.603.950,00				MBH
	20						Rim	69.264,00	1.385.280,00	20				Rim	69.264,00	1.385.280,00					
	Kertas F4 70 Gr									2.989.230,00							2.989.230,00				
17	Kertas A4 70 Gr	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover	Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PJK Kawasan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULA	025/202/02.08.02.1.01.0004/BAPB/DP/PAK/2025	10-Nov-25	4	Rim	64.200,00	256.800,00	KHP	025/202/02.08.02.1.01.0004/BAST/DP/PAK/2025	10-Nov-25	4	Rim	64.200,00	256.800,00				MBH
	7						Rim	69.300,00	485.100,00	7				Rim	69.300,00	485.100,00					
	Kertas F4 70 Gr									741.900,00							741.900,00				
18	Kertas A4 70 Gr	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover	Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kawasan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULA	025/203/02.08.02.1.02.0004/BAPB/DP/PAK/2025	04-Nov-25	14	Rim	64.156,00	898.212,00	SEKRETARIAT	025/203/02.08.02.1.02.0004/BAST/DP/PAK/2025	04-Nov-25	14	Rim	64.156,00	898.212,00				MBH
	16						Rim	69.264,00	1.245.752,00	16				Rim	69.264,00	1.245.752,00					
	Kertas F4 70 Gr									2.144.964,00							2.144.964,00				
19	Kertas A4 70 Gr	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover	Keg. Advokasi Inovasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kawasan Provinsi T.A.2025	CV. TIKA PAKSA SUKSES	025/196/02.08.06.1.02.0001/BAPB/DP/PAK/2025	31-Oct-25	3	Rim	53.950,00	159.150,00	PA	025/196/02.08.06.1.02.0001/BAST/DP/PAK/2025	31-Oct-25	3	Rim	53.950,00	159.150,00				MBH
	3						Rim	59.160,00	177.480,00	3				Rim	59.160,00	177.480,00					
	Kertas F4 70 Gr									336.630,00							336.630,00				
20	Kertas A4 70 Gr	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover	Keg. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kawasan Provinsi T.A.2025	CV. SINAR PERKASA MULA	025/196/02.08.06.1.02.0001/BAST/DP/PAK/2025	31-Oct-25	11	Rim	64.200,00	706.200,00	PA	025/196/02.08.06.1.02.0001/BAST/DP/PAK/2025	31-Oct-25	11	Rim	64.200,00	706.200,00				MBH
	11						Rim	69.300,00	762.300,00	11				Rim	69.300,00	762.300,00					
	Kertas F4 70 Gr									1.468.500,00							1.468.500,00				
21	Kertas A4 70 Gr	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Kertas	Keg. Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	CV. SINAR PERKASA MULA	025/206/02.08.01.1.09.0008/BAPB/DP/PAK/2025	14-Oct-25	3	Rim	64.000,00	192.000,00	UPTD	025/206/02.08.01.1.09.0008/BAST/DP/PAK/2025	14-Oct-25	3	Rim	64.000,00	192.000,00				MBH
	5						Rim	73.000,00	365.000,00	5				Rim	73.000,00	365.000,00					
	Kertas F4 80 Gr									557.000,00							557.000,00				
22	Kertas A4 70 Gr	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Simbol Daya Air dan Listrik T.A.2025	CV. SINAR PERKASA MULA	025/206/02.08.01.1.08.0002/APBUD/PAK/2025	14-Nov-25	1	Rim	64.200,00	64.200,00	UPTD	025/206/02.08.01.1.08.0002/BAST/DP/PAK/2025	14-Nov-25	1	Rim	64.200,00	64.200,00				MBH
	2						Rim	69.300,00	138.600,00	2				Rim	69.300,00	138.600,00					
	Kertas F4 70 Gr									202.800,00							202.800,00				

[illegible]

15	Balpoint Gel Ink Um-Bal UM 153	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kawerangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	02521024205021010000BAPBOP3AP2KB2025	19-Nov-25	5	Koran	28.000,00	140.000,00	KIP	02520240206021010000BASTIDP3AP2KB2025	10-Nov-25	10-Nov-25	5	Koran	28.000,00	140.000,00	NIHL
	Binder Clips 105						5	Koran	9.200,00	46.000,00					5	Koran	9.200,00	46.000,00	
	In Staples no 10 or 20 Kotak Kecil						7	Koran	31.000,00	217.000,00					7	Koran	31.000,00	217.000,00	
	Isolasi Remang						3	Buah	9.000,00	27.000,00					3	Buah	9.000,00	27.000,00	
	Other Foto						4	Koran	22.800,00	91.200,00					4	Koran	22.800,00	91.200,00	
	Pena Gel (1 Box)						1	Koran	55.000,00	55.000,00					1	Koran	55.000,00	55.000,00	
	Binder Clip 2RM 200						3	Koran	16.500,00	49.500,00					3	Koran	16.500,00	49.500,00	
										628.700,00							628.700,00		
16	Balpoint Gel Ink Umbal Broder UM 153	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Keg. Apresiasi Kabupaten dan Penerimaan Penghargaan Penghargaan Penghargaan Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi Kawerangan Provinsi	CV. SINAR PERKASA MULIA	0252010206021000004BAPBOP3AP2KB2025	7-Nov-25	2	Koran	250.000,00	510.000,00	SEKRETARAT	0252010206021000004BASTIDP3AP2KB2025	7-Nov-25	7-Nov-25	2	Koran	250.000,00	510.000,00	NIHL
	Cutter 1500						5	Buah	26.500,00	132.500,00					5	Buah	26.500,00	132.500,00	
	Other Foto PVC Foto 401						15	Buah	35.000,00	525.000,00					15	Buah	35.000,00	525.000,00	
	Pena Black Box Is 12 cm						2	Koran	50.000,00	100.000,00					2	Koran	50.000,00	100.000,00	
	Binder Clip 105						10	Koran	9.000,00	90.000,00					10	Koran	9.000,00	90.000,00	
	Post It Memo Sticky Notes 76x76 mm						5	Pack	12.000,00	60.000,00					5	Pack	12.000,00	60.000,00	
	Stapler 1100 No 10						5	Buah	24.000,00	120.000,00					5	Buah	24.000,00	120.000,00	
	In Staples Refill No 10 1 or 20 kotak kecil						2	Box	31.100,00	62.200,00					2	Box	31.100,00	62.200,00	
	Binder Clip 155						10	Koran	13.000,00	130.000,00					10	Koran	13.000,00	130.000,00	
	Paper Clips Tripartit No 3						2	Koran	25.000,00	50.000,00					2	Koran	25.000,00	50.000,00	
	Post It 600-9 Flag						5	Pcs	27.500,00	137.500,00					5	Pcs	27.500,00	137.500,00	
										1.901.200,00						1.901.200,00			
17	Cetak Map Datas Custom (Map Datas 260 g Full Color, Laminating Doff)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	CV. TIGA CAWAYA ELZIAN	0251960206011000000BAPBOP3AP2KB2025	31-Oct-25	347	Buah	22.977,00	7.973.919,00	SEKRETARAT	0251960206011000000BASTIDP3AP2KB2025	31-Oct-25	31-Oct-25	347	Buah	22.977,00	7.973.919,00	NIHL
										7.973.919,00							7.973.919,00		
18	Other Map Foto PVC Foto 401	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Keg. Penyediaan Jasa Pemangangan Unsur Pemerintah Daerah	CV. SINAR PERKASA MULIA	0252060206011000000BAPBOP3AP2KB2025	14-Nov-25	2	Buah	16.500,00	71.000,00	UPD	0252060206011000000BASTIDP3AP2KB2025	14-Nov-25	14-Nov-25	2	Buah	16.500,00	71.000,00	NIHL
	Pena RS Is 12 pcs						1	Koran	36.000,00	36.000,00					1	Koran	36.000,00	36.000,00	
	Binder Clip 105						2	Koran	9.000,00	18.000,00					2	Koran	9.000,00	18.000,00	
	Binder Clip Tripartit No 3						3	Koran	3.000,00	9.000,00					3	Koran	3.000,00	9.000,00	
	Post It High Note Arrow						1	Pack	50.000,00	50.000,00					1	Pack	50.000,00	50.000,00	
	Punch Hole/Pelubang Kartas No 40						1	Pcs	40.000,00	40.000,00					1	Pcs	40.000,00	40.000,00	
										238.000,00							238.000,00		
19	In Staples No 10 / or 20 Kotak Kecil	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Keg. Pemeliharaan Perantara dan Meubel Laminat	CV. SINAR PERKASA MULIA	0252060206011000000BAPBOP3AP2KB2025	14-Nov-25	2	Box	58.000,00	116.000,00	UPD	0252060206011000000BASTIDP3AP2KB2025	14-Nov-25	14-Nov-25	2	Box	58.000,00	116.000,00	NIHL
	Other Foto PVC Foto 401						5	Buah	36.000,00	180.000,00					5	Buah	36.000,00	180.000,00	
	Paper Clips Tripartit No 1						4	Koran	28.000,00	112.000,00					4	Koran	28.000,00	112.000,00	
	Post It 604-SH Flag Sign Here Arrow						1	Pack	54.000,00	54.000,00					1	Pack	54.000,00	54.000,00	
										462.000,00							462.000,00		
20	Balpoint Umbal Sign	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Keg. Apresiasi Kabupaten dan Penerimaan Penghargaan Penghargaan Penghargaan Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi Kawerangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	025227206031000001BAPBOP3AP2KB2025	15-Dec-25	2	Pack	282.900,00	565.800,00	PHF	025227206031000001BASTIDP3AP2KB2025	15-Dec-25	15-Dec-25	2	Pack	282.900,00	565.800,00	NIHL
	Map Karton 5002						2	Koran	110.700,00	221.400,00					2	Koran	110.700,00	221.400,00	
	Post It 600-8 Flag						10	Pcs	27.900,00	279.000,00					10	Pcs	27.900,00	279.000,00	
										1.066.200,00							1.066.200,00		
21	Balpoint Umbal Sign	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Keg. Penyediaan Layanan Pemangangan Kualitas Hidup Anak Kawerangan Provinsi T.A 2025	CV. SINAR PERKASA MULIA	0251960206061020000BAPBOP3AP2KB2025	31-Oct-25	1	Lusin	282.900,00	282.900,00	PA	0251960206061020000BASTIDP3AP2KB2025	31-Oct-25	31-Oct-25	1	Lusin	282.900,00	282.900,00	NIHL
	In Staples No 10 / or 20 Kotak Kecil						2	Koran	58.000,00	116.000,00					2	Koran	58.000,00	116.000,00	
	Box File						6	Pcs	31.000,00	186.000,00					6	Pcs	31.000,00	186.000,00	
	Other Map Foto						133	Lusin	4.800,00	384.000,00					133	Lusin	4.800,00	384.000,00	
	Pena Ballpoint BP 7						8	Pcs	4.100,00	32.800,00					8	Pcs	4.100,00	32.800,00	
	Post It Memo Sticky Notes 76x76						20	Pack	12.200,00	244.000,00					20	Pack	12.200,00	244.000,00	
	Post It SH Flag Sign Here						5	Pack	56.700,00	283.500,00					5	Pack	56.700,00	283.500,00	

**LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Belanja Bahan-Bahan Lainnya

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0012

NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekening	PENERIMAAN						PENGELUARAN						SISA				KETERANGAN
						Norma Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Dasar/urutan Kapside	Norma Berita Acara Serah Terima	Tgl. BAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	
1	Canting Batik		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelenggara Layanan Peningkatan Kualitas	025/1982/06.04.1.02.00/020BABRDP3AP2K52025	30-Jun-25	35	Buah	72.030,00	2.521.305,00	KHP	025/1982/06.04.1.02.0002/0ABST/DP3A P2K52025	30-Jun-25	35	Buah	72.030,00	2.521.305,00					Nihil
	Cap Membatik			2			Buah	1.830.390,00	3.660.780,00	2				Buah	1.830.390,00	3.660.780,00						
	Canting Kain			35			Buah	29.650,00	1.045.065,00	35				Buah	29.650,00	1.045.065,00						
	Kain Promosi/Kain Kantor			270			Meter	65.400,00	18.208.220,00	270				Meter	65.400,00	18.208.220,00						
	Lilin Membatik			25			Kg	102.564,00	2.564.100,00	25				Kg	102.564,00	2.564.100,00						
	Pewarna Batik			25			Kg	412.364,00	10.354.100,00	25				Kg	412.364,00	10.354.100,00						
	Busung Tangan Latex Bekas			40			Pcs	46.500,00	1.860.300,00	40				Pcs	46.500,00	1.860.300,00						
	Soda Ash Bekas			15			Kg	103.110,00	1.548.785,00	15				Kg	103.110,00	1.548.785,00						
	Soda Kue Bekas			2			Kg	103.110,00	206.238,00	2				Kg	103.110,00	206.238,00						
	Wartegase Batik			25			Kg	103.110,00	2.577.975,00	25				Kg	103.110,00	2.577.975,00						
									44.522.988,00							44.522.988,00						
2	Barang Jait		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Keg. Penguatan Kapasitas Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kawentasan	025/1932/06.04.1.01.00/030BABRDP3AP2K52025	20-Jun-25	200	Buah	1.990,00	398.000,00	SEKRETARIAT	025/1932/06.04.1.01.0003/0ABRDP3A P2K52025	20-Jun-25	200	Buah	1.990,00	398.000,00					Nihil
	Berling Otomatis Set			4			Set	214.990,00	859.584,00	4				Set	214.990,00	859.584,00						
	Canting Kain			84			Buah	29.070,00	1.918.080,00	84				Buah	29.070,00	1.918.080,00						
	Kain Penapis Kain Kertas Tabel			128			Meter	34.980,00	4.475.520,00	128				Meter	34.980,00	4.475.520,00						
	Kain Promosi/Kain Kantor			256			Meter	67.260,00	17.220.096,00	256				Meter	67.260,00	17.220.096,00						
	Kain Sempit Malaran			256			Meter	64.935,00	16.623.360,00	256				Meter	64.935,00	16.623.360,00						
	Minuman Kain			60			Buah	7.992,00	503.496,00	60				Buah	7.992,00	503.496,00						
	Pendekel, Pembuka Barang			64			Meter	9.990,00	639.360,00	64				Meter	9.990,00	639.360,00						
	Peniti Bina			128			Buah	54.940,00	7.032.960,00	128				Buah	54.940,00	7.032.960,00						
																49.672.056,00						

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Kepri



BUHHAUDON, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19710320 199003 1 006

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna

RESTY LIDYARNINGSIH, A.Mk
Pemata Muda Tk. I
NIP. 198801122011012004

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROVINSI : Kepulauan Riau
JENIS BARANG : Belanja Bahan-Isi Tabung Gas

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0010

NO	NAMA BARANG	Merk/T ype	Jenis Belanja	Nama Fasilitas	Rekening	PENERIMAAN						PENGELUARAN						JISA				KETERANGAN		
						Nomor Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Dialokasikan Kepada	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. BAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan		Harga Total	
N I H I L																								

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov.Kepri



BURHANUDDIN, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda
NIP.19740320 199803 1 008

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna

RESTY LIDYANINGSIH, A.Mk
Penata Muda Tk. I
NIP.198901122011012004

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 PROVINSI : Kepulauan Riau
 JENIS BARAN : Belanja Bahan-Bahan Baku

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0005

NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekamran	PENERIMAAN						PENGLUARAN						SISA				KETERANGAN		
						Nomor Berita Acara Penyerahan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Dibulatkan Kepada	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. BAS	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan		Harga Total	
N I H I L																								

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov Kepri



[Signature]
 BURHANUDDIN, S.Hut., M.H
 Penata Muda Utama Muda
 NIP. 19710320 199803 1 005

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
 Pengurus Barang Pengguna

[Signature]

RESTY LIDYANINGSIH, A.Mk
 Penata Muda Tk. I
 NIP.198901122011012004

LAPORAN BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER TAHUN 2025

SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 PROVINSI Kepulauan Riau
 JENIS BARANG Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0004

NO	NAMA BARANG	Merk/Type	Jenis Belanja	Nama Kegiatan	Rekanan	PENERIMAAN						PENGELUARAN						SISA				KETERANGAN	
						Nomor Berita Acara Penerimaan Barang	Tgl. BA	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Disetujui Kepala	Nomor Berita Acara Serah Terima	Tgl. BAST	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan	Harga Total	Jumlah	Satuan Barang	Harga Satuan		Harga Total
1	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax)		Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T. A 2025	PT. SANTAN ANUGERAH BERSAMA		2-Jan-25	40	Lembar	100.000,00	4.000.000,00	SEKRETARIAT		2-Jan-25	40	Lembar	100.000,00	4.000.000,00					NIHL
											4.000.000,00							4.000.000,00					
2	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax)		Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T. A 2025	PT. SANTAN ANUGERAH BERSAMA		2-Jan-25	75	Lembar	100.000,00	7.500.000,00	SEKRETARIAT		2-Jan-25	75	Lembar	100.000,00	7.500.000,00					NIHL
								20	Lembar	20.000,00	400.000,00				20	Lembar	20.000,00	400.000,00					
											8.000.000,00							8.000.000,00					
3	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax)		Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T. A 2025	PT. SANTAN ANUGERAH BERSAMA		23-Jan-25	32	Lembar	100.000,00	3.200.000,00	LPTD		23-Jan-25	32	Lembar	100.000,00	3.200.000,00					NIHL
								13	Lembar	20.000,00	260.000,00				13	Lembar	20.000,00	260.000,00					
											3.460.000,00							3.460.000,00					
4	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax)		Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T. A 2025	PT. SANTAN ANUGERAH BERSAMA		3-Feb-25	50	Lembar	100.000,00	5.000.000,00	SEKRETARIAT		3-Feb-25	50	Lembar	100.000,00	5.000.000,00					NIHL
											5.000.000,00							5.000.000,00					
5	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax)		Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T. A 2025	PT. SANTAN ANUGERAH BERSAMA		18-Feb-25	46	Lembar	100.000,00	4.600.000,00	SEKRETARIAT		18-Feb-25	46	Lembar	100.000,00	4.600.000,00					NIHL
								10	Lembar	20.000,00	200.000,00				10	Lembar	20.000,00	200.000,00					
											5.000.000,00							5.000.000,00					
6	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo Pertamax)		Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T. A 2025	PT. SANTAN ANUGERAH BERSAMA		22-Feb-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00	SEKRETARIAT		22-Feb-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00					NIHL

6	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	BERSAMA		20	Lembar	20.000,00	400.000,00			20	Lembar	20.000,00	400.000,00						
									10.000.000,00						10.000.000,00						
7	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)	Bekas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	14-Mar-25	54	Lembar	100.000,00	6.400.000,00	UPTD		14-Mar-25	54	Lembar	100.000,00	6.400.000,00					NPHL
	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)					26	Lembar	20.000,00	520.000,00				26	Lembar	20.000,00	520.000,00					
									6.920.000,00							6.920.000,00					
8	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)	Bekas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	9-Apr-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00	SEKRETARIAT		9-Apr-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00					NPHL
						20	Lembar	20.000,00	400.000,00				20	Lembar	20.000,00	400.000,00					
									10.000.000,00							10.000.000,00					
9	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)	Bekas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	5-May-25	98	Lembar	100.000,00	9.600.000,00	SEKRETARIAT		5-May-25	98	Lembar	100.000,00	9.600.000,00					NPHL
	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)					20	Lembar	20.000,00	400.000,00				20	Lembar	20.000,00	400.000,00					
									10.000.000,00							10.000.000,00					
10	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)	Bekas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	5-Jun-25	80	Lembar	100.000,00	8.000.000,00	SEKRETARIAT		5-Jun-25	80	Lembar	100.000,00	8.000.000,00					NPHL
	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)					25	Lembar	20.000,00	500.000,00				25	Lembar	20.000,00	500.000,00					
									8.500.000,00							8.500.000,00					
11	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)	Bekas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	3-Jul-25	80	Lembar	100.000,00	8.000.000,00	SEKRETARIAT		3-Jul-25	80	Lembar	100.000,00	8.000.000,00					NPHL
						26	Lembar	20.000,00	520.000,00				26	Lembar	20.000,00	520.000,00					
									8.500.000,00							8.500.000,00					
12	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)	Bekas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	11-Jun-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00	UPTD		11-Jun-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00					NPHL
	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)					39	Lembar	20.000,00	780.000,00				39	Lembar	20.000,00	780.000,00					
									10.380.000,00							10.380.000,00					
13	Kupon BBM Bahan Bakar (Perdamas Turbo-Perdamas)	Bekas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	5-Jun-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00	SEKRETARIAT		5-Jun-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00					NPHL

13	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax)	Perumas (BBM)	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A. 2025	BERSAMA		20	Lembar	20.000,00	400.000,00			20	Lembar	20.000,00	400.000,00						
									10.000.000,00						10.000.000,00						
14	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax)	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A. 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	25-Aug-25	64	Lembar	100.000,00	6.400.000,00	UPTD		25-Aug-25	64	Lembar	100.000,00	6.400.000,00					NIHIL
						28	Lembar	20.000,00	520.000,00				28	Lembar	20.000,00	520.000,00					
									6.920.000,00							6.920.000,00					
15	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax)	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A. 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	2-Sep-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00	SEKRETARAT		2-Sep-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00					NIHIL
						20	Lembar	20.000,00	400.000,00				20	Lembar	20.000,00	400.000,00					
									10.000.000,00							10.000.000,00					
16	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax)	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A. 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	2-Oct-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00	SEKRETARAT		2-Oct-25	96	Lembar	100.000,00	9.600.000,00					NIHIL
						20	Lembar	20.000,00	400.000,00				20	Lembar	20.000,00	400.000,00					
									10.000.000,00							10.000.000,00					
17	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax)	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A. 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	1-Sep-25	32	Lembar	100.000,00	3.200.000,00	UPTD		1-Sep-25	32	Lembar	100.000,00	3.200.000,00					NIHIL
						13	Lembar	20.000,00	260.000,00				13	Lembar	20.000,00	260.000,00					
									3.460.000,00							3.460.000,00					
18	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax)	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A. 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	13-Oct-25	32	Lembar	100.000,00	3.200.000,00	UPTD		13-Oct-25	32	Lembar	100.000,00	3.200.000,00					NIHIL
						13	Lembar	20.000,00	260.000,00				13	Lembar	20.000,00	260.000,00					
									3.460.000,00							3.460.000,00					
19	Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax) Kupon BBM Bahan Bakar (Pertamax Turbo-Perlamax)	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas (BBM)	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan T.A. 2025	PT. BANTAN ANUGERAH BERSAMA	4-Nov-25	143	Lembar	100.000,00	14.300.000,00	SEKRETARAT		4-Nov-25	143	Lembar	100.000,00	14.300.000,00					NIHIL
						23	Lembar	20.000,00	460.000,00				23	Lembar	20.000,00	460.000,00					
									14.760.000,00							14.760.000,00					

